

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM KEGIATAN
SIMPAN PINJAM UNTUK KELOMPOK PEREMPUAN (SPP)**

(Studi pada Koperasi Wanita “Randubango Maju” Desa Randubango Kecamatan Mojosari
Kabupaten Mojokerto)

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh gelar sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Disusun Oleh :

MELATI DESY PUSPITA

105030101111088



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2017

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan didepan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis
 Tanggal : 8 Juni 2017
 Jam : 11.00 – 12.00
 Skripsi atas nama : Melati Desy Puspita
 Judul : Pemberdayaan Perempuan Dalam Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si
NIP. 19690524 200212 2 002

Anggota



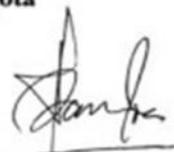
Drs. Abdul Wachid, MAP
NIP. 19561209 198703 1 008

Ketua



Dr. Mardiyono, MAP
NIP. 19520523 197903 1 001

Anggota



Rendra Eko Wismanu, SAP, MAP
NIP. 201107 851214 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 3 Mei 2017



Nama : Melati Desy Puspita

NIM : 105030101111088

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Melati Desy Puspita

Nomor Induk Mahasiswa : 105030101111088

Tempat Dan Tanggal Lahir : 28 Desember 1991

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Dsn. Belahan Ds. Randubango 32/09

Kecamatan

Mojosari Kabupaten Mojokerto

Fakultas : Ilmu Administrasi Publik

Email : Melatidesy06@gmail.com



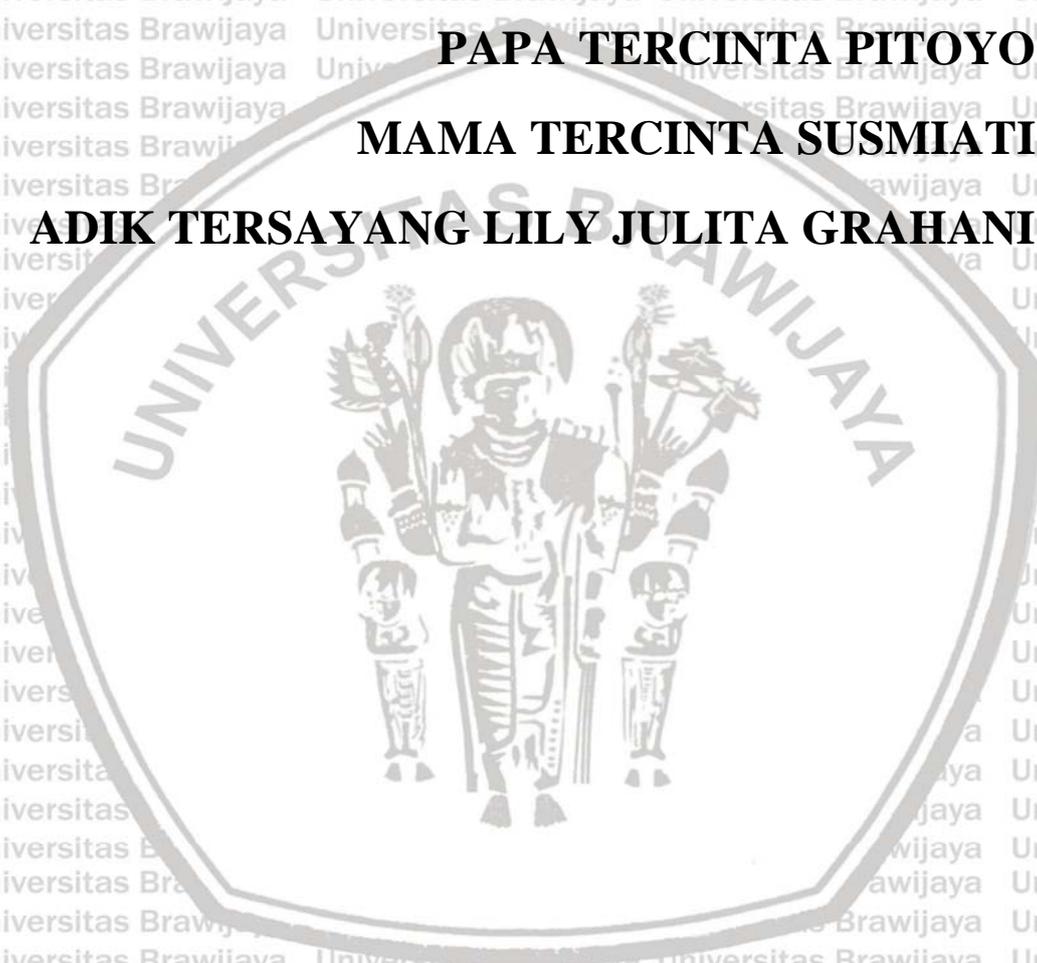
B. Riwayat Pendidikan

No	Pendidikan Formal	Tahun
1	SD Negeri 1 Mojosari	1998-2004
2	SMP Negeri 1 Mojosari	2004-2007
3	SMA Negeri 1 Mojosari	2007-2010
4	Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya	2010-2017



LEMBAR PERSEMBAHAN

**KARYA INI KUPERSEMBAHKAN
KEPADA KEDUA ORANG TUAKU
PAPA TERCINTA PITOYO
MAMA TERCINTA SUSMIATI
ADIK TERSAYANG LILY JULITA GRAHANI**



RINGKASAN

Melati Desy Puspita, 2017, **Pemberdayaan Perempuan Dalam Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP) (Studi pada Koperasi Wanita “Randubango Maju” Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)**, Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si, Drs. Abdul Wachid, M.AP
120 hal + xi

Koperasi merupakan gerakan perekonomian rakyat dan juga merupakan suatu pilar ekonomi yang membutuhkan perhatian dari pemerintah yang cukup serius. Untuk itu, melaksanakan kegiatan simpan pinjam untuk perempuan (SPP) sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat khususnya bagi kaum perempuan. Kegiatan simpan pinjam untuk perempuan (SPP) sarannya adalah ibu rumah tangga yang bertujuan agar dapat membantu perekonomian keluarga dengan membuka usaha sendiri dengan modal yang dipinjam dari koperasi wanita yang sedang dikembangkan di Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan perempuan dalam kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) di Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini difokuskan pada menganalisis pemberdayaan perempuan dalam kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP). Penelitian ini dilaksanakan pada Koperasi Wanita “Randubango Maju” di Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan analisis data dari Miles Huberman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan dalam kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) ini dengan memberdayakan kaum perempuan. Upaya pemberdayaan yang dilakukan dalam kegiatan ini meliputi : menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal, memperkuat pengetahuan dan kemampuan masyarakat, melindungi masyarakat dari persaingan tidak seimbang, memelihara kondisi kondusif dari berbagai kelompok masyarakat, penyokongan pendapatan keluarga. Faktor pendukung kegiatan ini meliputi adanya pengawasan, jumlah dan aktivitas anggota. Sedangkan faktor penghambatnya adalah masih rendahnya kemampuan anggota.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam pemberdayaan perempuan dalam kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) telah dilakukan dengan baik dan diterima oleh masyarakat Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Rekomendasi yang diberikan antara lain: perlunya penambahan pengawas, syarat dan prosedur pengajuan pinjaman sebaiknya lebih disederhanakan, perlunya sosialisasi tentang pentingnya pembayaran angsuran tepat waktu.

Kata Kunci : *Pemberdayaan, Sumber Daya Manusia dan Koperasi Wanita*

SUMMARY

Melati Desy Puspita, 2017, **The Women's Empowerment In Savings and Loan Association For Women (SPP) (A Study on Women's Cooperation "Randubango Maju" Randubango Village Mojosari Subdistrict Mojokerto District)**, Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si, Drs. Abdul Wachid, M.AP 120 page + xi

Cooperative is people's economic movement and also an economic pillar that needs more attention from the government. As a women's empowerment program, it needs to build a savings and loan association for women (SPP). The target of this program is housewives in Randubango village Mojosari Subdistrict Mojokerto District. The aim of this program is to help the families' economic by opening their own small business using loan from the cooperative.

The study aimed to describe and analyze the women's empowerment in savings and loan association for women (SPP) program in the Randubango Village Mojosari Subdistrict Mojokerto District. The study used descriptive method with qualitative approach. This study focused on analyzing the women's empowerment in savings and loan association for women (SPP) and the factors that support and resist the program of savings and loan of women (SPP). The study was conducted at the Women's Cooperative "Maju Randubango" in the Randubango District Village Mojosari Subdistrict Mojokerto District. The Data was collected by using data analysis of Miles Huberman.

The results of this study indicates that the women's empowerment in savings and loan association for women (SPP) is to empower women. The efforts to empower women in this program are: to create an atmosphere that allows the potential of the society develop optimally, to strengthen the knowledge and ability of the society, to protect the public from unbalanced competition, to maintain the good conditions of different population groups who produce family income. The supporting factors of this program are the control, the number of the members and their activity, yet the obstacle is the low ability of the members.

The conclusion of this study is that the women's empowerment in savings and loan association for women (SPP) has been done well and accepted by the villagers of Randubango Village Mojosari Subdistrict Mojokerto District. The recommendations for the program are the need of increasing the control, simplifying the requirements and procedures in making loan, and socializing the importance of paying the instalment on time.

Key Terms : *Empowerment, Human Resources and Women's Cooperative*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pemberdayaan Perempuan Dalam Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP) (Studi pada Koperasi Wanita “Randubango Maju” Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto).**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
4. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing, mengarahkan dan menasehati penulis
5. Bapak Drs. Abdul Wachid, M.AP selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing, mengarahkan dan menasehati penulis

6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan pegawai Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

7. Pengelola dan anggota Koperasi Wanita “Randubango Maju” Desa Randubango yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini

8. Masyarakat Desa Randubango yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini

9. Papa (Bpk. Pitoyo) dan Mama (Ibu Susmiati), serta Adik (Lily Julita Grahani) yang senantiasa memberikan dukungan moril dan doa dari awal hingga akhir penyelesaian skripsi. Serta keluarga besar penulis yang telah banyak membantu dan memberikan semangat pada penulis

10. Mas Afan Rochim Romadon yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk segera menyelesaikan skripsi

11. Afrina Fitri yang selalu menemani dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini

12. Teman kos sidorukun yang sudah seperti keluarga dan selalu memberikan semangat

13. Teman-teman kuliah yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi

14. Keluarga Jl. Masjid yang selalu memberikan dukungan kepada penulis agar cepat menyelesaikan skripsi

15. Keluarga ceramah yang selalu memberikan dukungan

16. Keluarga betonezer yang selalu memberikan dukungan

17. Deddy dan selly, teman seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi

18. Pihak-pihak lain yang turut membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu



Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 11 April 2017

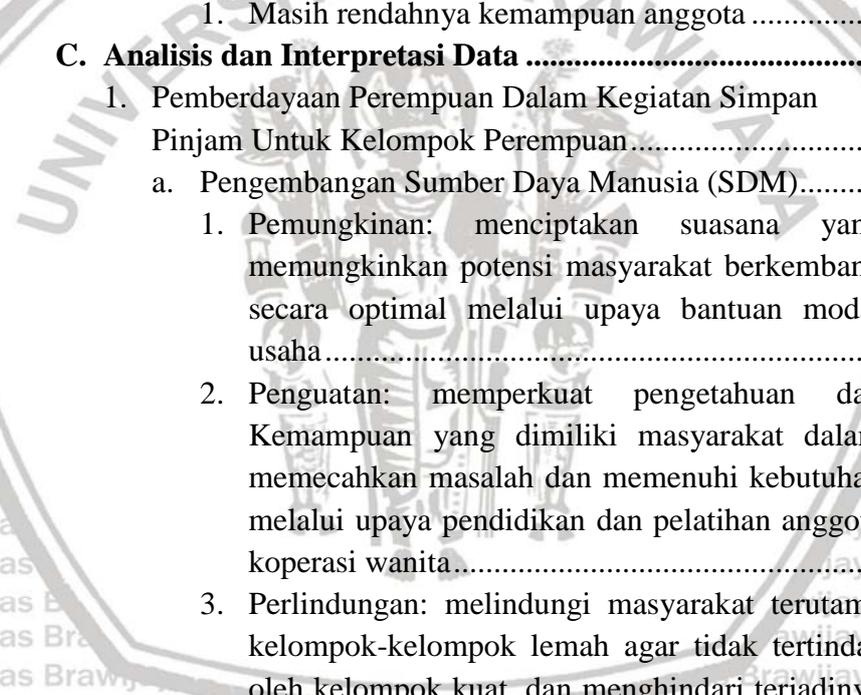
Penulis



DAFTAR ISI

COVER.....	i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	iv
SUMMARY	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kontribusi Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Administrasi Publik	12
B. Administrasi Pembangunan	14
1. Definisi Pembangunan	14
2. Administrasi Pembangunan	17
C. Konsep Pemberdayaan	20
1. Pengertian Pemberdayaan	20
2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	22
3. Sasaran Pemberdayaan Masyarakat	23
4. Pendekatan Pemberdayaan	24
5. Upaya Pemberdayaan	25
D. Pemberdayaan Perempuan	30
1. Pengertian Pemberdayaan Perempuan	30
2. Peran Pemberdayaan Perempuan	31
3. Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga	32
E. Koperasi Simpan Pinjam	33
1. Definisi Koperasi Simpan Pinjam	33
2. Asas Dan Prinsip Koperasi Simpan Pinjam	35
3. Pentingnya Koperasi Simpan Pinjam	37

BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Fokus Penelitian.....	42
C. Lokasi Penelitian.....	44
D. Jenis dan Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Instrument Penelitian.....	49
G. Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54
A. Penyajian Data Umum	54
1. Gambaran Umum Kecamatan Mojosari.....	54
a. Visi Misi.....	54
b. Kondisi Geografis Dan Administratif.....	55
c. Topografi.....	56
d. Penduduk.....	56
2. Gambaran Umum Desa Randubango.....	57
a. Sejarah.....	57
b. Geografis Desa.....	59
c. Demografi.....	60
d. Keadaan Sosial.....	65
e. Keadaan Ekonomi.....	67
f. Kondisi Pemerintahan.....	68
B. Penyajian Data Fokus Penelitian	71
1. Pemberdayaan Perempuan Dalam Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan.....	71
a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).....	72
1. Pemungkinan: menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal melalui upaya bantuan modal usaha.....	73
2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan Kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan melalui upaya pendidikan dan pelatihan anggota koperasi wanita.....	75
3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, dan menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan lemah melalui upaya pembekalan ide kreatif agar usaha beragam.....	78

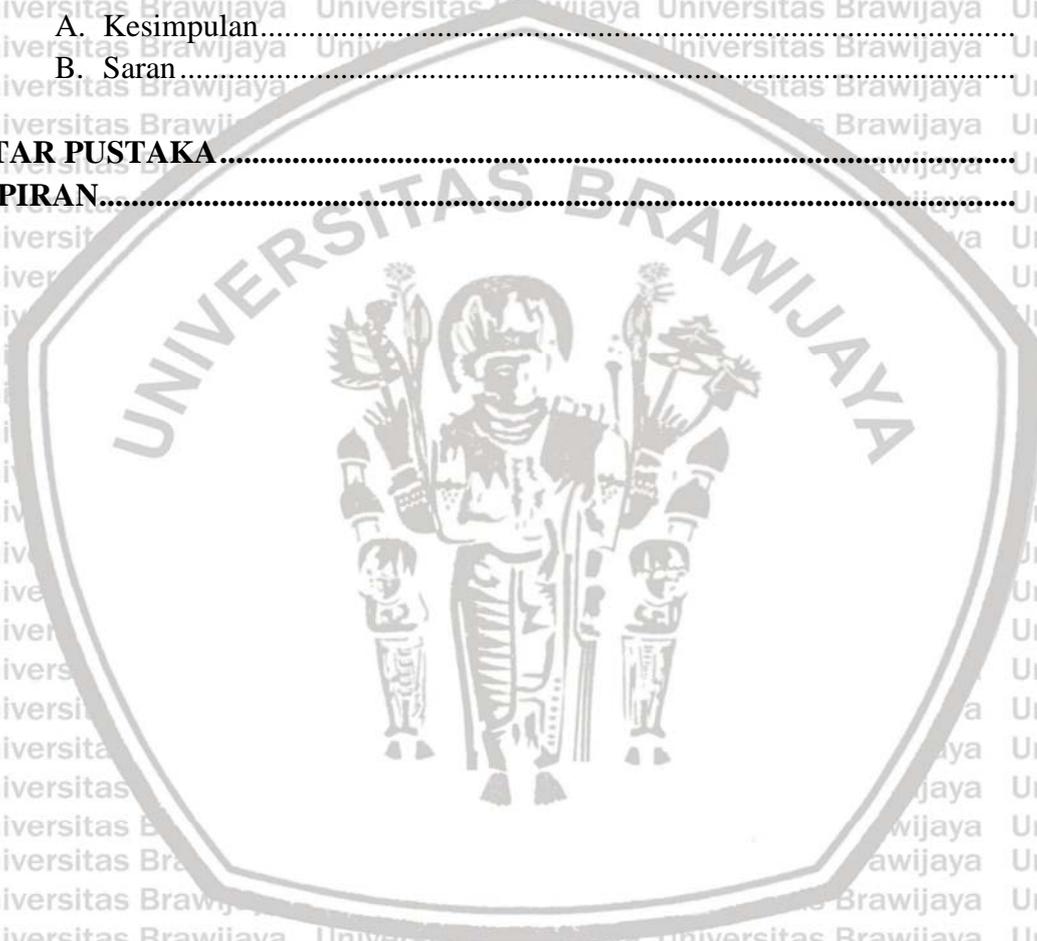


4. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap menjadi keseimbangan distribusi berbagaiKelompok dalam masyarakat melalui upaya mewujudkan aspirasi anggota kopwan	82
b. Penyokongan Pendapatan Keluarga	83
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Perempuan dalam Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan	87
a. Faktor Pendukung.....	87
1. Adanya pengawasan dari pengelola dibidang pengawas	87
2. Jumlah dan aktivitas anggota	90
b. Faktor Penghambat.....	93
1. Masih rendahnya kemampuan anggota	93
C. Analisis dan Interpretasi Data	97
1. Pemberdayaan Perempuan Dalam Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan.....	97
a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).....	98
1. Pemungkinan: menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal melalui upaya bantuan modal usaha.....	98
2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan Kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan melalui upaya pendidikan dan pelatihan anggota koperasi wanita.....	99
3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, dan menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan lemah melalui upaya pembekalan ide kreatif agar usaha beragam	101
4. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap menjadi keseimbangan distribusi berbagai kelompok dalam masyarakat melalui upaya mewujudkan aspirasi anggota kopwan	103
b. Penyokongan Pendapatan Keluarga	105



2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Perempuan dalam Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan	107
c. Faktor Pendukung	107
1. Adanya pengawasan dari pengelola dibidang pengawas	107
2. Jumlah dan aktivitas anggota	108
d. Faktor Penghambat	110
1. Masih rendanya kemampuan anggota	110

BAB V PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN	120



DAFTAR TABEL

1. Tabel Data Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2016.....	2
2. Tabel Data Penduduk Miskin Di Kecamatan Mojosari Tahun 2016.....	4
3. Tabel Jumlah Penduduk Kecamatan Mojosari Tahun 2016.....	57
4. Tabel Jumlah Penduduk Desa Randubango Berdasarkan Usia Tahun 2016.....	60
5. Tabel Jumlah Penduduk Desa Randubango Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016....	60
6. Tabel Jumlah Penduduk Desa Randubango Berdasarkan Angkatan Kerja Tahun 2016..	61
7. Tabel Daftar Anggota Koperasi Wanita “Randubango Maju” Tahun 2016.....	62
8. Tabel Pendidikan Terakhir Penduduk Desa Randubango Tahun 2016.....	66
9. Tabel Pejabat Pemerintah Desa Randubango.....	70
10. Tabel Badan Permusyawaratan Desa Randubango.....	70



DAFTAR GAMBAR

1.	Komponen Analisis Data Model Interaktif.....	50
2.	Peta Wilayah Kecamatan Mojosari	56
3.	Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Randubango.....	69
4.	Hasil budidaya jamur anggota kopwan "Randubango Maju".....	80
5.	Hasil olahan dari jamur (Keripik Jamur) anggota kopwan "Randubango Maju".....	81
6.	Hasil pemanfaatan pekarangan.....	84
7.	Hasil pemanfaatan pekarangan.....	85
8.	Pengawasan pada anggota kopwan "Randubango Maju".....	89
9.	Pengawasan pada anggota kopwan "Randubango Maju".....	90
10.	Rapat Akhir Tahun (RAT) Kopwan "Randubango Maju".....	93



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan dan Cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia dengan tujuan Masyarakat Adil dan Makmur terutama pada arah kebijakan ekonomi yang menyatakan bahwa Pembangunan Nasional harus mampu mengupayakan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada masa-masa sekarang ini, Indonesia mempunyai masalah antara lain kemiskinan. Hal ini terjadi karena pengaruh dari krisis moneter yang dialami Indonesia, sehingga banyak pengangguran yang akan berpengaruh terhadap keterbelakangan pengetahuan. Kemiskinan dapat diukur dengan tingkat pendapatan. Seseorang disebut miskin apabila tingkat pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan.

Dalam laporan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten Mojokerto, keluarga miskin dapat dibagi menjadi dua bagian / kriteria yaitu :

1. Keluarga miskin sekali

Keluarga miskin sekali apabila keluarga yang tidak dapat memenuhi 1s/d3 dari 6 (enam) indikator penentu.

2. Keluarga Miskin

Keluarga miskin apabila keluarga tidak mampu memenuhi 4 s/d 6 dari indikator penentu.

Adapun 6 indikator penentu kemiskinan menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana nasional (BKKBN) tersebut ialah :

- 1) Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
- 2) Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk keperluan dirumah, disekolah dan bepergian.
- 3) Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.
- 4) Paling kurang sekali seminggu keluarga menyediakan daging/telur/ikan.
- 5) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru setahun sekali.
- 6) Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk siap huni.

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia diukur dari indikator BKKBN pada tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini :

Table 1 Data Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2009-2013

Tahun	Jumlah penduduk	Persentase Penduduk Miskin
2009	32, 592. 90	14.15
2010	31, 023. 39	13.33
2011	30, 018. 93	12.49
2012	29, 132. 40	11.96
2013	28, 066. 56	11.37

Sumber: Data penduduk miskin di Indonesia BKKBN 2015

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencatat jumlah penduduk penduduk miskin hingga Maret 2013 mengalami penurunan sebesar 0,52 juta orang dibanding September 2012. Penurunan jumlah penduduk miskin ini terjadi karena masyarakat Indonesia sudah mengalami peningkatan pendapatan. Jumlah penduduk miskin hingga Maret 2012 mencapai 29,13 juta orang. Adapun pada September 2012 turun menjadi 28,59 juta orang, sementara pada Maret 2013 kembali turun menjadi 28,07 juta orang. Jumlah penduduk miskin ini sudah mengalami penurunan, meski tipis. Ini disebabkan karena pendapatan masyarakat sudah mulai meningkat.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Mojokerto masih tinggi, yaitu lebih besar dari 50 %. Hal ini terjadi karena tidak stabilnya pendapatan, serta naik turunnya harga bahan pokok, ini sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat di perdesaan yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani, hasil dari bertani tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari melainkan hanya cukup untuk bertahan hidup karena biaya untuk mengolah lahan pertanian harganya semakin mahal sedangkan hasil panen yang mereka dapat harganya rendah. Apabila dikaitkan dengan tingkat kemiskinan per Kecamatan di Kabupaten Mojokerto, Jumlah keluarga miskin di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini :

Table 2 Data Penduduk Miskin Kecamatan Mojosari Tahun 2004-2006

Tahun	Jumlah penduduk per KK	Jumlah Keluarga Miskin	Persentase
2004	18.035	10.682	52.00
2005	18.028	11.237	62.33
2006	19.485	10.132	52.00

Sumber : Dokumen BKKBN (Data penduduk miskin kecamatan mojosari kabupaten mojokerto) 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah KK miskin di Kecamatan Mojokerto juga masih diatas 50%, bahkan keadaannya lebih besar jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan pada Kabupaten. Hal ini terjadi karena krisis moneter serta terjadinya penurunan tingkat perekonomian baik secara nasional maupun secara lokal pada tahun 1997. Untuk penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Indonesia mulai Tahun 1994 telah meluncurkan Program Pengentasan Kemiskinan seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Kemiskinan Terpadu(PKT), Program Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT), sedangkan mulai tahun 2002 Program Pengentasan Kemiskinan yang diluncurkan Pemerintah Indonesia dikelola oleh Departemen atau Lembaga Pengelola. Pada Tahun1998, Pemerintah Indonesia mulai meluncurkan Program Penanggulangan Kemiskinan yang bernama Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam penyelenggaraan penyediaan sarana dan prasarana sosial, ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Mojokerto dimulai tahun 1998, namun PPK berkembang dimulai pada awal

tahun 2003. Sasaran Program Pengembangan Kecamatan adalah kelompok penduduk miskin pedesaan pada kecamatan miskin. Untuk kecamatan lokasi PPK ditentukan oleh team koordinasi PPK Pusat dikoordinasi oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan :

- a. Jumlah penduduk miskin dan peringkat kemiskinan.
- b. Kecamatan yang desa miskinnya banyak.

Dalam pelaksanaan PPK, masyarakat diberi pelimpahan wewenang dan kebebasan yang penuh oleh pemerintah untuk mengelola, menentukan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi, dan melestarikan kegiatan sendiri. Dalam pelaksanaan PPK yang tidak kalah penting adalah keterlibatan kaum perempuan mulai dari perencanaan sampai pelestarian. Dalam kegiatan ini perempuan diberi kesempatan untuk menentukan usulan dalam forum pertemuan perempuan di tingkat kelompok dan dusun yang ditetapkan oleh Musyawarah Khusus Perempuan (MKP). Dalam pengusulan ini perempuan diberi kesempatan untuk mengusulkan 2 usulan dari 3 usulan yang ditetapkan pada musyawarah desa. Dua usulan dari MKP meliputi usulan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Hasil dari Musyawarah Khusus Perempuan (MKP) setiap desa di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto semua mengusulkan kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan. Maka pada tahun 2006 ditetapkanlah bagian dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yaitu Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP). Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok

Perempuan ini ditujukan untuk ibu rumah tangga agar dapat membantu perekonomian keluarga dengan membuat usaha sendiri dengan modal yang dipinjam dari koperasi wanita yang sedang dikembangkan di desa.

Upaya untuk mengembangkan program yang telah ditetapkan dalam hal ini Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan maka pemberdayaan seluruh elemen dari masyarakat sangat menentukan keberhasilan program tersebut.

Upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat memberikan jaminan bahwa seluruh potensi yang dimiliki oleh koperasi datar terwujud. Partisipasi pada dasarnya merupakan suatu bentuk kepedulian dari pelaksanaan seluruh aktivitas yang dilakukan sebagai upaya untuk memaksimalkan pencapaian tujuan. Oleh karena itu, peneliti akan membahasnya lebih lanjut dengan judul **"Pemberdayaan Perempuan Dalam Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP) (Studi pada Koperasi Wanita Randubango Maju Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)"**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberdayaan perempuan dalam kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP) di desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto ?
2. Faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat pemberdayaan perempuan dalam kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP) di Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemberdayaan perempuan dalam kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SSP) di Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pemberdayaan perempuan dalam kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto.

D. Kontribusi Penelitian

Dilihat dari sudut pandang pengembangan ilmu, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai (*value*) terhadap semua pihak baik yang terkait dengan penerapan konsep partisipasi masyarakat terhadap kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan secara akademis maupun praktis.

Adapun kontribusi dari penelitian ini antara lain:

1. Kontribusi Akademis

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan administrasi publik dan memberikan informasi ilmiah berupa pengembangan teoritis yang lebih luas dan mendalam tentang konsep partisipasi, terutama mengenai partisipasi masyarakat dalam kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan.

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan bagi peneliti untuk menambah wawasan baru dalam berpikir, analisis, dan membandingkan keadaan nyata di lapangan dengan teori-teori yang ada dan yang telah dipelajari pada perkuliahan.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi info pembanding bagi penelitian yang telah lalu dan sebagai bahan referensi serta bahan masukan bagi penelitian yang akan datang dengan judul dan topik yang sama.

2. Kontribusi Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Koperasi dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto untuk menetapkan perencanaan dan kebijakan terutama dalam upaya meningkatkan peran perempuan.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga yang ikut serta dalam kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan sebagai penyempurnaan praktek dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk memberikan layanan yang bermutu untuk semua komponen khususnya masyarakat.

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi masyarakat apakah semua sudah ikut berperan aktif dalam mengatasi masalah tingginya angka kemiskinan di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto.

E. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun berdasarkan pokok-pokok yang dituangkan secara sistematis dan terdiri dari lima bab, dimana bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan menyangkut masalah partisipasi perempuan dalam kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP). Untuk mempermudah dalam pemahaman tulisan ini, maka sistematika penulisannya disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini terdiri dari lima subbab. *Pertama*, latar belakang yang menjelaskan identifikasi masalah tentang tinggi rendahnya jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia, pentingnya partisipasi masyarakat khususnya perempuan dalam meningkatkan mutu ekonomi keluarga di Indonesia, serta pemaparan sekilas tentang partisipasi perempuan dalam meningkatkan mutu ekonomi keluarga melalui kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan. *Kedua*, perumusan masalah penelitian yang meliputi bagaimana tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan, serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. *Ketiga*, tujuan penelitian yang hendak dicapai antara lain untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk partisipasi perempuan, upaya pihak yang terkait untuk mengoptimalkan partisipasi perempuan dalam kegiatan tersebut

diatas. *Keempat*, kontribusi penelitian yang meliputi kontribusi secara akademis dan praktis. *Kelima*, sistematika pembahasan yang merupakan uraian singkat dari bab-bab penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini antara lain tentang teori public, teori administrasi pembangunan, paradigma pembangunan, definisi partisipasi masyarakat, pentingnya partisipasi masyarakat, bentuk, jenis, dan macam partisipasi masyarakat, definisi koperasi simpan pinjam, serta fungsi dan jenis koperasi simpan pinjam. Teori-teori tersebut digunakan dalam analisis untuk memperkuat hasil penelitian di lapangan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan langkah-langkah teknis dan praktis sehingga tujuan penelitian diperoleh. *Pertama*, mengenai jenis penelitian yaitu jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. *Kedua*, fokus penelitian antara lain bentuk partisipasi perempuan dalam kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto yang terdiri dari keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program tersebut diatas. *Ketiga*, lokasi penelitian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. *Keempat*, sumber data yang digunakan dalam penelitian berupa data primer dan sekunder. *Kelima*, teknik pengumpulan data

melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. *Keenam*, instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri, pedoman wawancara, dan perangkat lainnya. *Ketujuh*, analisis data dengan model analisis interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum yang meliputi lokasi dan situs penelitian, hasil dari pengumpulan data dari fokus yang digunakan pada penelitian ini dan analisis dari setiap fokus tersebut

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran diharapkan dapat berguna bagi pengelola koperasi wanita “Randubango Maju” dan anggota Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kajian pustaka ini diuraikan tentang konsep-konsep atau teori-teori yang akan digunakan untuk memperdalam penelitian ini. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat dalam pemaparan di bawah ini:

A. Administrasi Publik

Administrasi publik melingkupi segala kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan publik atau kebutuhan publik. Menurut Chanler dan Plano (dalam Syafri Wisman, 2012:29) administrasi publik adalah suatu proses dimana sumber daya dan personel publik di organisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan dan kebijakan publik. Disini mereka menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur kebijakan publik serta memecahkan permasalahan publik yang terjadi dalam suatu organisasi atau yang lainnya. Merumuskan apa yang dimaksud dengan administrasi publik tidaklah sederhana, para pakar membuat definisinya sendiri dari satu sisi atau dimensi pokoknya. Menurut Dimock & Dimock (dalam Syafri Wisman, 2012:22) administrasi publik ialah pencapaian tujuan yang ditetapkan secara politis. Meskipun demikian, administrasi publik bukan sekedar teknik atau pelaksanaan program-program melainkan berkenaan dengan kebijakan umum.

Sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan, terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan. Hakekat administrasi

publik menurut Yeremias T.Keban (dalam Jamaluddin 2015:102) adalah administrasi publik lebih berkaitan dengan dunia eksekutif, meskipun juga berkaitan dengan dunia yudikatif dan legislatif. Berkenaan dengan formulasi dan implementasi kebijakan publik, administrasi publik berkaitan dengan manusiawi dan usaha kerja sama untuk mengerjakan tugas-tugas pemerintah. Administrasi publik diarahkan untuk menghasilkan barang dan jasa publik. Kemudian menurut Grey (dalam Jamaluddin Ahmad 2015:102) menjelaskan peran administrasi publik dalam masyarakat, yaitu :

1. Menjamin pemerataan distribusi pendapatan nasional kepada kelompok masyarakat miskin secara adil.
2. Melindungi hak-hak rakyat atas kepemilikan kekayaan, serta menjamin kebebasan bagi rakyat untuk melaksanakan tanggung jawab atas diri mereka.
3. Melestarikan nilai tradisi masyarakat yang sangat bervariasi.

Administrasi publik menurut Dimock & Dimock terbagi menjadi empat, yaitu :

1. Apa yang dilakukan pemerintah seperti pengaruh kebijakan, tindakan-tindakan politis, dasar-dasar wewenang, lingkungan kerja pemerintah, penentuan tujuan, kebijakan administratif kedalam rencana-rencana.
2. Bagaimana pemerintah mengatur organisasi, personalia, pembiayaan, usaha, dan struktur administrasi dari segi formalnya.
3. Bagaimana para administrator mewujudkan kerjasama.
4. Bagaimana pemerintah tetap bertanggung jawab baik dari pengawasan eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

Administrasi publik adalah administrasi dari Negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan menurut

Prajudi Atmosudirjo (dalam Syafiie 2003:32). Kemudian Gerald E Caiden (dalam Syafiie 2003:33) memberikan patokan bahwa untuk menentukan apakah suatu organisasi tersebut termasuk pemerintah adalah melihat tiga hal, yaitu organisasinya dibentuk dengan peraturan pemerintah, karyawannya disebut pegawai negeri, dan pembiayaannya berasal dari uang rakyat.

B. Administrasi Pembangunan

1. Definisi Pembangunan

Istilah pembangunan sudah tidak asing lagi bagi setiap warga negara. Pembangunan selalu menjadi fokus utama kegiatan negara dan telah menjadi sesuatu yang dapat memotivasi untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan dalam setiap aspek kehidupan. Pembangunan sering diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Menurut WW. Rostow (dalam Listyaningsih, 2014:24) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yaitu masyarakat yang terbelakang terhadap masyarakat yang maju. Proses ini dengan berbagai variasinya, pada dasarnya berlangsung sama dimanapun dan kapanpun juga. Variasi yang ada bukan merupakan perubahan yang mendasar dari proses ini, melainkan hanya berlangsung di permukaan saja. Rostow membagi proses pembangunan ini menjadi lima tahap, antara lain :

- 1) **Masyarakat tradisional**, dimana ilmu pengetahuan belum dikuasai, percaya pada pengetahuan gaib dan tunduk pada alam. Masyarakat ini cenderung statis, artinya kemajuan berjalan dengan sangat lambat. Produksi masih sangat terbatas dan digunakan untuk konsumsi serta tidak ada investasi.
- 2) **Prakondisi untuk lepas landas**, pengaruh dan campur tangan dari luar

masyarakat menggoncangkan masyarakat tradisional, di dalamnya mulai berkembang ide dan pembaharuan. Pada periode ini usaha meningkatkan tabungan masyarakat terjadi. Tabungan ini kemudian dipakai untuk melakukan investasi pada sektor-sektor produktif yang menguntungkan. Segala usaha untuk meningkatkan produksi mulai bergerak dalam periode ini.

- 3) **Lepas landas**, ditandai dengan tersingkirnya hambatan-hambatan yang menghalangi proses pertumbuhan ekonomi. Sektor industri mulai berkembang pesat, keuntungannya sebagian besar ditanamkan pada pabrik baru. Demikian juga pada sektor pertanian, pertanian menjadi usaha komersial untuk mencari keuntungan dan bukan sekedar untuk dikonsumsi. Peningkatan dalam produktivitas pertanian merupakan sesuatu yang penting dalam proses lepas landas karena proses modernisasi masyarakat membutuhkan hasil pertanian yang banyak, agar ongkos perubahan tidak terlalu mahal.
- 4) **Bergerak kekedewasaan**, 60 tahun sejak Negara lepas landas, kedewasaan biasanya tercapai. Perkembangan industry terjadi tidak saja meliputi teknik-teknik produksi, tetapi juga dalam aneka barang yang diproduksi. Dan yang diproduksi bukan saja terbatas pada barang produksi, tetapi juga pada barang modal.
- 5) **Jaman konsumsi masal yang tinggi**, akibat kenaikan pendapatan masyarakat, konsumsi tidak terbatas pada kebutuhan pokok untuk hidup, tetapi meningkat pada kebutuhan yang lebih tinggi. Produksi industri juga berubah, dari kebutuhan dasar berubah menjadi kebutuhan yang tahan lama. Sesudah taraf kedewasaan tercapai, surplus ekonomi akibat proses politik yang terjadi dialokasikan untuk kesejahteraan social dan penambahan modal sosial. Pada

titik ini, pembangunan sudah merupakan proses yang berkesinambungan, yang bisa menopang secara terus menerus.

Pada dasarnya berbicara tentang pentingnya faktor manusia sebagai komponen penting sebagai penopang pembangunan. Menurut Alex Inkeles dan David Smith (dalam Listyaningsih, 2014:26) pembangunan bukan sekedar pemasokan modal dan teknologi saja, melainkan dibutuhkan manusia yang dapat mengembangkan saran material tersebut supaya menjadi produktif. Untuk itu dibutuhkan apa yang disebut manusia modern. Manusia modern yang dimaksud adalah yang memiliki ciri-ciri : keterbukaan terhadap pengalaman dan ide baru, berorientasi pada masa sekarang dan masa depan, mempunyai kemampuan merencanakan, percaya manusia bisa menguasai alam dan bukan sebaliknya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan tidak hanya merupakan perubahan-perubahan secara konkrit saja, tetapi rakyat juga perlu mendapat kemampuan yang besar untuk memberi tanggapan terhadap perubahan tersebut. Sehingga perubahan karena pembangunan harus memperhatikan potensi individu sekaligus otonomi mereka (kapasitasnya).

Pembangunan sebagai suatu peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan berarti bahwa pembangunan merupakan penumbuhan kekuasaan dan wewenang bertindak yang lebih besar kepada rakyat lemah. Pembangunan tidak hanya dilakukan satu orang dan bukan ide dari satu orang saja, tetapi lebih merupakan keinginan dan harapan dari rakyat sebagai mayoritas. Kemampuan masyarakatlah yang akan menjadi roda dari pembangunan. Dengan kemampuan itu maka pembangunan harus dilaksanakan atas kemampuan sendiri, tidak lagi dengan bantuan dari pihak lain. Jika pembangunan dibantu oleh pihak lain sama

artinya dengan tidak membangun melainkan menggantungkan.

Semakin berkembangnya persepsi masyarakat tentang realita pembangunan dengan persepsi agen (*innovator*) pembangunan, maka semakin besar pula probabilitas kesediaan masyarakat untuk mengadopsi dan melaksanakan pembangunan. Implikasi pemikiran ini terhadap kebijaksanaan pembangunan bahwa strategi subsidi dalam pembangunan yang didasarkan atas *top-down approach* yang memandang masyarakat sebagai obyek pembangunan harus diubah menjadi *bottom-up approach* yang menempatkan posisi masyarakat bukan hanya sebagai obyek pembangunan tetapi justru sebagai subyek pembangunan untuk menentukan nasib dan kebutuhannya sendiri, definisi pembangunan menurut Easton (dalam Suryono, 2004:97). Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah suatu proses untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya, dilakukan secara sadar dan terencana yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Selain itu, dengan pembangunan diharapkan suatu negara tersebut bisa meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya.

2. Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di negara-negara yang sedang membangun. Oleh karena itu, karakteristik utama administrasi pembangunan adalah memberikan pelayanan dan pengabdian yang sebaik-sebaiknya kepada masyarakat. Dari sudut praktek, administrasi pembangunan merangkum dua kegiatan besar dalam satu kesatuan pengertian, yakni administrasi dan pembangunan. Menurut Listyaningsih (2014:17)

administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kebijakan yang telah diputuskan dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya secara efektif dan efisien. Selanjutnya pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara menuju arah yang lebih baik.

Definisi administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu Negara untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya, Siagian (2003:5). Definisi tersebut secara mutlak menunjukkan bahwa upaya dan kegiatan pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah dengan segala aparat dan seluruh jajarannya meskipun harus diakui bahwa peranan pemerintah cukup dominan. Demikian definisi yang diungkapkan oleh siagian mengenai administrasi pembangunan adalah keseluruhan usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupan sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan. Definisi administrasi pembangunan menurut sudut pandang Afiffuddin (2010:62) adalah suatu cabang ilmu administrasi publik yang mengerjakan urusan pemerintah berkaitan dengan pembangunan menyeluruh. Lebih lanjut Tjokroamidjojo (dalam listyaingsih 2014:18) mendefinisikan administrasi pembangunan diartikan sebagai proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara (pemerintah) untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan kearah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan didalam berbagai aspek kehidupan bangsa.

Administrasi pembangunan juga berperan untuk melibatkan kegiatan masyarakat luas, sesuai dengan arah dan kebijaksanaan yang ditetapkan dalam proses pembangunan. Dari definisi yang disampaikan oleh para ahli mengenai administrasi pembangunan, kemudian Siagian (dalam listyaningsih 2014:18-19) menyimpulkan bahwa terdapat tujuh ide pokok dalam administrasi pembangunan, antara lain:

1. Pembangunan merupakan suatu proses, berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang di satu pihak bersifat independen akan tetapi dipihak lain merupakan bagian dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir (*never ending*).
2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.
3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, sedang maupun jangka pendek.
4. Rencana pembangunan mengandung makna, pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu Negara untuk berkembang dan tidak sekedar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan eksistensinya.
5. Pembangunan mengarah kepada modernitas, diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih dari sebelumnya, cara berfikir yang rasional dan system budaya yang kuat tetapi fleksibel.
6. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan perdefinisi bersifat multidimensional, artinya modernitas tersebut mencakup

seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

7. Dari keenam ide pokok diatas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga Negara yang bersangkutan semakin kukuh fondasinya dan semakin mantap keberadaannya ditengah-tengah Negara lain.

Pemaparan diatas menunjukkan bahwa administrasi pembangunan dapat didefinisikan sebagai seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara dan bangsa untuk tumbuh, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

C. Konsep Pembedayaan

1. Pengertian pemberdayaan

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan merupakan kegiatan serangkaian untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami kemiskinan. Pemberdayaan sebagai proses merupakan perubahan diri masyarakat secara partisipatif menuju kesejahteraan kemandirian (Nadhir, 2009:1) sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada hasil atau keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, yang memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik ekonomi, maupun sosial seperti memiliki rasa kepercayaan diri, mempunyai mata pencaharian, mampu menyampaikan aspirasi, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas kehidupannya Menurut Jim Ife, 1995 (dalam Zubaedi

2013:74)

“Pemberdayaan adalah memberikan sumberdaya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya (*empowerment means providing people with the resources, opportunities, knowledge and skills to increase their capacity to determine their own future and to participate in and affect the life of their community*)”

Pemberdayaan tidak hanya diujukan pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang terbatas dalam mencapai kemandirian. Hal ini senada dengan makna pemberdayaan menurut Sulistiyani (2004:79) merupakan upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki. Sedangkan menurut Margono Slamet (dalam Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan, 2004:57) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya sendiri (memperbaiki kehidupan sendiri).

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) menurut Notoatmodjo (dalam Pratiwi, 2013:21) adalah merupakan upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan adalah terjemahan dari *empowerment*. Menurut Mernam *Webster Oxford English Dictionary* kata *empower* mengandung dua pengertian yaitu :

1. *To give power* atau memberikan kekuasaan pengalihan atau mendelegasikan otoritas dari pihak lain.
2. *To give ability to* atau *enable* atau usaha untuk meberikan kemampuan.

Pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau

kemampuan. Hulme dan Tunner (dalam Pratiwi, 2013:24) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal dan nasional. Pemberdayaan sifatnya individual sekaligus kolektif. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut berbagai hubungan kekuasaan/kekuatan yang berubah antara individu, kelompok dan beberapa lembaga sosial (Pratiwi, 2013:24). Menurut definisinya, pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin) untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengendalikan kelembagaan masyarakat secara bertanggungjawab demi perbaikan kehidupannya (Pratiwi, 2013:24). Pemberdayaan juga diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau kekuatan (*strength*) kepada masyarakat. Keberadaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat mampu bertahan (*survive*) dan dalam pengertian dinamis maupun mengembangkan diri untuk mencapai tujuan-tujuannya. (Pratiwi, 2013:24).

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan adalah mengembangkan partisipasi masyarakat miskin, yakni berkembangnya sikap, pengetahuan dan keterampilan berusaha agar mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya. Oleh karena itu ada beberapa prinsip pemberdayaan yang tidak boleh dilupakan, yaitu pemberdayaan merupakan proses penguatan dan kesadaran diri, keyakinan bahwa masyarakat mempunyai kemampuan untuk berkembang, pendekatan pemberdayaan bermaksud menciptakan situasi yang mendukung perkembangan masyarakat,

pendekatan pemberdayaan berangkat dari lapisan paling bawah, pemberdayaan memprioritaskan pada partisipasi serta memperhatikan aspek lingkungannya.

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan menjadikan masyarakat lebih mandiri terutama agar terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan atau ketidakberdayaan (Cholisin, 2011:2). Sedangkan tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil) (Suharto, 2005:60). Hal ini selaras dengan pendapat Sulistiyani (2004:80) yang menyatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya atau kemampuan yang dimiliki.

3. Sasaran Pemberdayaan Masyarakat

Perlu dipikirkan siapa yang sesungguhnya menjadi sasaran pembangunan. Pada awalnya upaya pemberdayaan ditujukan untuk masyarakat yang berada pada posisi atau kondisi yang lemah baik itu masyarakat secara keseluruhan maupun masyarakat pada wilayah tertentu yang sama sekali belum berdaya. Hal ini sejalan dengan pendapat Suharto (2005:58) menyatakan bahwa :

“Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber prioduktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.”

4. Pendekatan Pemberdayaan

Pemberdayaan pada hakikatnya merupakan sebuah konsep yang fokusnya adalah hal kekuasaan, Suharto (2005:67) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan proses dan pencapaian yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokngan, dan Pemeliharaan:

1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.
2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, dan menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan lemah.
4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-ugas kehidupannya.
5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap menjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Pemahaman hakikat pemberdayaan yang berbeda-beda maka menurut Parsons et al (1994:112-113) mengatakan bahwa pelaksanaan proses pemberdayaan dilakukan secara kolektif. Menurutnya tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam hubungan satu lawan satu. Akan tetapi, tidak semua pelaksanaan proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa kondisi, strategi pemberdayaan dapat dilakukan secara individual. Walaupun demikian strategi tersebut tetap berkaitan dengan kolektivitas dalam arti sasaran pemberdayaan dikaitkan dengan sumber atau sistem lain diluar dirinya.

5. Upaya Pemberdayaan

Upaya pemberdayaan masyarakat umumnya dilakukan secara kolektif. Hal ini sejalan dengan pendapat Parsons et al (dalam Suharto, 2005:66) bahwa tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dan klien dalam *setting* pertolongan perseorangan. Jim ife (dalam Zubaedi, 2007:45) menyatakan upaya memberdayakan kelompok masyarakat yang lemah dapat dilakukan dengan tiga strategi. Pertama, pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Kedua, pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik yang dilakukan dengan perjuangan politik dan gerakan dalam rangka membangun kekuasaan yang efektif. Ketiga, pemberdayaan melalui pendidikan dan pertumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas.

Pemberdayaan masyarakat harus dimulai dari pemahaman bahwa setiap masyarakat itu pada dasarnya memiliki daya, berapa pun kecilnya atau bahkan yang masih berupa potensi daya. Untuk mencapai tujuan pemberdayaan, Mardikarto dan Soebianto (2012:111) memaparkan berbagai upaya perbaikan yang harus dilaksanakan diantaranya:

a. Perbaikan pendidikan

Perbaikan pendidikan dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai sesuatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan, tidak terbatas pada perbaikan materi, perbaikan metode, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat, tetapi lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup.

b. Perbaikan aksesibilitas

Dengan tumbuh dan berkembangnya semangat seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi dan inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, serta lembaga pemasaran.

c. Perbaikan tindakan

Dengan berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumber daya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin baik.

d. Perbaikan kelembagaan

Dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan, diharapkan akan

memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.

e. Perbaiki usaha

Perbaiki pendidikan, perbaikan aksesibilitas, kegiatan dan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

f. Perbaiki pendapatan

Dengan terjadinya perbaikan bisnis, diharapkan akan memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.

g. Perbaiki lingkungan

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali diakibatkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

h. Perbaiki lingkungan

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

i. Perbaiki masyarakat

Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Kunci utama dalam keberhasilan upaya pemberdayaan masyarakat adalah partisipasi. Mikkelson (2001:64) berpendapat bahwa partisipasi memiliki pengertian sebagai suatu proses yang aktif yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait mengambil inisiatif dan melakukan kebebasannya

untuk melakukan hal itu. Konsep dari gagasan partisipasi pada dasarnya partisipasi merupakan pemberdayaan, partisipasi bermakna mencari ruang kepada masyarakat untuk menjadi subyek terhadap proses perubahan sosial, pengambilan keputusan dan aksi melawan ketidakadilan untuk transformasi sosial mereka sendiri. Terdapat beberapa pendekatan yang bisa dilakukan oleh pihak yang memberdayakan atau pelaku pemberdayaan. Salah satunya pendekatan menurut Suharto (2006:67) yang dapat disingkat menjadi 5P yaitu Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan:

1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.
2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, dan menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan lemah.
4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya.
5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap menjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Meskipun secara umum sudah terdapat kesepakatan akan adanya pemberdayaan masyarakat, namun terdapat beberapa permasalahan dalam prakteknya. Permasalahan tersebut menyangkut ketiadaan konsep yang jelas

mengenai apa itu pemberdayaan, peran masing-masing pemerintah, masyarakat dan swasta, mekanisme pencapaiannya, dan sebagainya. Lebih lanjut Prasojo (2004:11) menjelaskan permasalahan lain yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, antara lain:

1. Diskontinuitas dan koordinasi, yaitu keseluruhan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan tersebut tidak dikoordinasikan dengan baik dan dilaksanakan secara sporadis. Kebijakan pemerintah kadang malah bersebrangan dengan pendamping yang dilakukan LSM.
2. Disinformasi program, yaitu pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan sebagai bantuan para konsultan terkadang tidak dipahami oleh masyarakat. Bahasa yang digunakan oleh para ilmuwan atau konsultan tersebut terkadang tidak dapat dipahami oleh masyarakat atau lembaga pelaksana dari pemberdayaan masyarakat tersebut.
3. Disorientasi, yaitu pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan proses biasanya memerlukan waktu yang cukup lama. Banyaknya masalah baru muncul, disertai hasil yang belum nampak nyata terkadang menjadikan fasilitator (pendamping) baik dari pemerintah atau LSM, mengubah kebijakan yang lebih nyata. Langkah strategis yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan menyelaraskan kedua pendekatan tersebut.
4. Generelisasi, yaitu diferensiasi sosial, politik, dan budaya yang ada di Indonesia merupakan kekayaan yang tidak ternilai. Dengan kondisi yang majemuk tersebut, maka diperlukan pendekatan pembangunan dan pemberdayaan yang tidak bersifat monolitik dan bersifat dinamis.
5. Rentang birokrasi dan tingginya biaya operasional, yaitu berbagai peraturan

hukum dan undang-undang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang kaku, yang hanya didasarkan pada surat keputusan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis juga sistem penganggaran, dan menjadi petunjuk penghambat dalam pemberdayaan masyarakat. Akibatnya, tujuan pemberdayaan masyarakat sulit untuk dicapai karena orientasi petugas lebih dari kepada mengakui peraturan dari pada menjawab kebutuhan lapangan.

6. Indikator yang tidak tepat, yaitu pemberdayaan masyarakat selama ini diukur dalam bentuk fisik, komoditas dengan orientasi pada input dan kualitatif dari pada non fisik dengan ukuran keberhasilan dari dampak dan proses.

Berbagai hambatan yang telah diungkapkan diatas merupakan gambaran dari hambatan yang secara umum telah melekat pada setiap upaya pemberdayaan masyarakat. Hambatan tersebut dapat berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang meliputi dari dalam, misalkan sumber daya manusia yang masih rendah dan faktor eksternal meliputi dari luar, meliputi motivasi atau kemalasan masyarakat. Baik faktor internal dan faktor eksternal tersebut harus dicari pemecahan masalahnya agar pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Pemberdayaan Perempuan

1. Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Telah banyak dilakukan berbagai penelitian mengenai pemberdayaan perempuan di berbagai belahan dunia utamanya di negara miskin dan sedang berkembang, hal ini menunjukkan bahwa perempuan diberbagai belahan dunia

dahulu tidak memiliki “daya” pada dekade terakhir ini dilakukan usaha pemberdayaan oleh organisasi-organisasi dunia dan pemerintahan negara-negara tersebut. Seperti orang lanjut usia, anak-anak dan penyandang cacat, perempuan juga termasuk kelompok yang tidak berdaya (Sadan, 2004:98). Sebagian besar wanita tidak berdaya karena budaya yang masih mengakar pada masyarakat. Budaya yang membatasi ruang gerak perempuan, karena menganggap perempuan lebih rendah posisinya dibanding dengan laki-laki, yang mengakibatkan ketidakberdayaan ganda pada perempuan, yaitu sebagai anggota dari suatu rumah tangga miskin dan perempuan dalam subordinasi pria, seperti yang disampaikan oleh Friedman:

“Despite a certain lability of gender roles, the overall structure of household relations throughout the world openly discriminates against women and keeps them in a state of permanent subordinates vis-a-vis males, both inside the household and in the wider public domain. The results is woman’s double disempowerment as members of poor household and whitin the household, by virtue of their sex.”(1992:109)

Peran biologis perempuan sebagai ibu mendorong subordinasi mereka dalam urutan penempatan sistem sosial. Kehamilan, aborsi dan kelahiran, ditambah dengan ketergantungan baik terhadap ibu sebagai sumber pangan dan gizi (konsumsi ASI) mengikat perempuan dalam lingkungan domestik (Friedman, 1992:109).

2. Peran Pemberdayaan Perempuan

Begitu kompleksnya peran perempuan dalam rumah tangga serta beratnya beban yang ditanggung oleh perempuan dalam keluarga miskin, maka diperlukan pemikiran tentang konsep pemberdayaan perempuan yang mempertimbangkan berbagai aspek yang meliputi peran perempuan tersebut. Wanita penting untuk ditingkatkan keberdayaannya dan mengartikan pemberdayaan bukan dalam

konteks mendominasi orang lain dengan makna apa yang diperoleh wanita merupakan kehilangan baik laki-laki melainkan menempatkan pemberdayaan dalam arti kemampuan wanita untuk meningkatkan kemandirian (*self reliance*) dan kekuatan dalam dirinya (Priyono, 1996:199). Pemberdayaan tidak lepas dari peran perempuan, menurut Sumodiningrat (dalam Sulistiyani, 2004:78) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah pemberian energi agar yang bersangkutan mampu bergerak secara mandiri. Sehubungan dengan konsep pemberdayaan ini Winarni mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah pengembangan (*enabling*), memperkuat daya atau potensi (*empowerment*), dan kemandirian.

Sesuai dengan tujuan pemberdayaan, maka pemberdayaan perempuan dimaksudkan agar perempuan dapat mencapai kemandirian. Kemandirian masyarakat adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang ditandai oleh kemampuan memikirkan, memutuskan, dan melakukan sesuatu yang dipandang tepat untuk mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan menggunakan kemampuan seperti kemampuan *kognitif, konatif, psikomotorik, efektif*, dengan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Dengan demikian sebuah proses untuk memberdayakan perempuan juga berkaitan dengan pembangunan ekonomi lokal.

3. Peran Perempuan dalam Rumah Tangga

Peran perempuan dalam rumah tangga dikaitkan dengan fungsi domestik atau pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan rumah sehari-hari. Maksud dari perempuan disini adalah perempuan yang dianggap dapat melakukan pekerjaan baik pekerjaan rumah tangga maupun pekerjaan diluar rumah untuk menambah

pendapatan keluarganya (bukan anak-anak/usia ≥ 15 tahun seperti yang dikategorikan di BPS). Pekerjaan rumah tangga sehari-hari yang dimaksud adalah kesibukan rumah tangga setiap hari seperti memasak (bisa juga menyiapkan makanan bila makanan dibeli diluar), membersihkan rumah, mencuci barang-barang rumah tangga/pakaian, merawat anak-anak dan orang tua (usia lanjut), serta kewajiban sosial sebagai anggota masyarakat. Apabila perempuan berada dalam posisi keluarga yang miskin akibatnya beban pekerjaan akan bertambah karena perempuan juga memiliki kewajiban untuk menambah pendapatan keluarganya dengan cara bekerja diluar rumah.

Keterlibatan perempuan dalam menghasilkan perekonomian bukanlah sesuatu yang baru kemaren menjadi penting tetapi memang merupakan bagian dari hidup perempuan, menurut Quah (1990:7), Kontribusi dalam produksi kebutuhan rumah tangga berada dalam dua masalah utama yaitu: jumlah yang diproduksi dan nilai ekonomi dari waktu yang diperlukan untuk memproduksinya. Jumlah dari waktu yang dihitung yang diperlukan untuk jasa keseharian dalam keperluan untuk memasak, membersihkan rumah, mencuci, dan berbagai kebutuhan lain yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangga.

E. Koperasi Simpan Pinjam

1. Definisi koperasi simpan pinjam

Koperasi merupakan gerakan perekonomian rakyat dan juga merupakan suatu pilar ekonomi yang membutuhkan perhatian dari pemerintah yang cukup serius. Koperasi biasanya dijadikan sebagai suatu upaya bagi pemerintah untuk mengurangi adanya pengangguran dan juga untuk mengentas kemiskinan. Koperasi adalah suatu organisasi yang dimiliki dan dijalankan oleh beberapa

orang demi kepentingan bersama. Koperasi dijalankan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat. Definisi koperasi menurut Undang-Undang Pasal 1 No. 25 Tahun 1992 adalah suatu badan usaha yang terdiri dari beberapa orang sebagai anggotanya dan juga berbadan hukum berdasarkan asas kekeluargaan. Namun pada oktober 2012, Dewan Perwakilan Rakyat melalui sidang peripurna menyetujui Rancangan Undang-Undang Pasal 1 No. 25 Tahun 1992 perlu diganti, karena sudah tidak selaras dengan kebutuhan hukum dan perkembangan koperasi di Indonesia.

Landasan utama Kementerian Koperasi dan UKM untuk melahirkan Undang-Undang Perkoperasian terbaru. Dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2012 dijelaskan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Dari definisi tersebut mengandung makna koperasi sebagai badan hukum yang tidak ada bedanya dengan badan usaha lain. Undang-Undang No.17 Tahun 2012 masih berlandaskan pada asas kekeluargaan. Didalam kegiatan koperasi terjadi suatu kegiatan yang sering disebut dengan kegiatan simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam diadakan untuk memberikan suatu kesempatan pada seluruh anggotanya untuk mendapatkan pinjaman dengan mudah dan juga dengan bunga yang ringan. Koperasi simpan pinjam selalu berusaha mencegah anggotanya terjerumus kedalam jeratan lintah darat pada saat mereka membutuhkan uang. Hal ini diatasi dengan cara meningkatkan gerakan menabung dan mengatur kegiatan simpan pinjam dengan memberikan bunga yang rendah.

Koperasi simpan pinjam mencari dana dari anggotanya dan kemudian menyalurkan dana yang diperoleh kepada anggotanya. Koperasi simpan pinjam mempunyai tujuan untuk memberikan pendidikan kepada anggotanya agar bisa hidup lebih hemat.

2. Asas dan prinsip koperasi simpan pinjam

Asas koperasi adalah kekeluargaan, asas ini sejalan dengan penegasan Pasal 33 ayat 1 Undang – Undang Dasar 1945 (hasil amandemen ke-4). Manusia Indonesia percaya bahwa dirinya tidak akan mendapat perkembangan dengan baik bila ia tidak bekerja sama dengan anggota masyarakat lainnya (Baswir, 2002 : 46). Kesadaran seperti itulah yang kemudian mendorong tumbuhnya sikap mental yang mengarah pada semangat kekeluargaan. Dengan diangkatnya semangat kekeluargaan sebagai asas koperasi, maka diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pada masing-masing orang yang terlibat dalam organisasi koperasi untuk senantiasa bekerja sama dengan anggota-anggota koperasi lainnya dengan rasa setia kawan yang tinggi. Rasa setia kawan yang tinggi sangat penting artinya bagi perkembangan usaha koperasi. Sebab rasa setia kawan akan mendorong setiap anggota koperasi untuk merasa sebagai satu keluarga besar senasib dan sepenanggungan dalam memenuhi hajat hidup. Koperasi dalam menjalankan kegiatannya harus didasarkan pada prinsip koperasi. Prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah sebagai berikut :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan adil dan sebanding dengan besarnya jasa

usaha masing-masing

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian

Dalam pengembangan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut :

1. Pendidikan koperasi
2. Kerjasama antar anggota

Prinsip koperasi atau dapat juga disebut sendi-sendi dasar koperasi adalah pedoman pokok yang menjiwai setiap gerak langkah pengelolaan dan usaha koperasi. Prinsip koperasi memiliki peranan yang penting dalam menentukan pola pengelolaan usaha koperasi. Peranan tersebut dalam garis besarnya adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman pelaksanaan usaha koperasi dalam mencapai tujuannya
2. Sebagai ciri-ciri khas koperasi, yang membedakannya dengan bentuk-bentuk usaha lainnya.

Sebagai pedoman koperasi dalam menjalankan usahanya adalah untuk memperjuangkan kepentingan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Orientasi kepada anggota pada khususnya, dan anggota masyarakat pada umumnya tidak sekedar pembeda antara koperasi dengan bentuk usaha-usaha lainnya, tapi merupakan hakekat dari koperasi itu sendiri. Sebagai ciri khas koperasi, koperasi tidak hanya mengatur masalah-masalah intern koperasi, yaitu mekanisme kerja didalam organisasi dan hubungan antara koperasi dengan anggota-anggotanya yang terlibat didalam pengurusan koperasi. Tetapi juga mengatur hubungan antara koperasi dengan

badan usaha lainnya.

3. Pentingnya koperasi simpan pinjam

Latar belakang pendirian koperasi tidak dapat dipisahkan dari keinginan masyarakat golongan ekonomi lemah untuk memperbaiki keadaan ekonomi mereka. Hal itu tidak hanya terjadi ketika koperasi pertama berdiri di Inggris, tetapi juga terjadi diberbagai Negara lainnya diseluruh eropa. Dengan berjuang melalui koperasi, keadaan sosial ekonomi kaum buruh dan petani di berbagai Negara mengalami perbaikan yang cukup drastis. Pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka yang semula banyak bergantung pada usaha para tengkulak, kemudian dapat mereka penuhi sendiri. Pendirian koperasi memang tidak dapat dilepaskan dari adanya kesadaran adanya manfaat usaha koperasi. Pertimbangan-pertimbangan mendirikan koperasi dilihat dari berbagai sudut pandang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Alasan Historis

Sejarah mencatat bahwa pendiri koperasi sedikit banyak dipengaruhi perjalanan historis suatu bangsa. Sejarah koperasi Indonesia setelah ratusan tahun hidup dalam tekanan politik dan ekonomi kolonial, bangsa Indonesia mewarisi suatu keadaan ekonomi dualistik, yaitu suatu situasi perekonomian dimana terdapat ketimpangan yang dalam antara sektor perekonomian modern yang dikuasai oleh para saudagar asing, dengan sektor perekonomian rakyat tempat sebagian besar rakyat Indonesia menggantungkan hidupnya. Setelah merdeka, bangsa Indonesia mulai berbenah diri. Salah satu upaya yang segera dilakukan adalah memperbaiki taraf hidup rakyat banyak, yaitu dengan melaksanakan pembangunan perekonomian sebagai usaha bersama berdasar

atas asas kekeluargaan.

2) Alasan Sosiologis

Selain memiliki kebutuhan ekonomi, setiap manusia juga memiliki kebutuhan sosial. Selaku makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain. Dorongan-dorongan atau naluri manusia untuk mempertahankan diri, bergaul, tolong-menolong, perasaan ingin dihargai dan sebagainya menyebabkan manusia selalu ada kehendak untuk bergaul, bersatu, atau berkumpul dengan sesamanya. Kebutuhan ini cenderung mendorong setiap orang untuk mencari teman senasib dan seperjuangan. Rasa senasib dan seperjuangan inilah biasanya yang mendorong seseorang untuk bergabung menjadi anggota koperasi. Dalam masyarakat Indonesia, adanya rasa senasib dan seperjuangan telah lama ada. Hal ini tampak ada tumbuhnya lembaga gotong royong sebagai salah satu ciri kultural bangsa kita. Dalam masa penjajahan, rasa senasib dan seperjuangan itu tentu makin kuat, tidak hanya secara politis dan ekonomi, bangsa kita ditindas oleh kaum penjajah, tapi juga karena secara sosiologis bangsa kita hanya dihargai sebagai manusia kelas tiga. Rasa senasib dan seperjuangan itulah yang mendorong para pemuka bangsa kita memilih koperasi sebagai wadah pemberdayaan ekonomi rakyat (Baswir, 1997:91).

3) Alasan Ekonomis

Sebagai organisasi ekonomi, pendirian koperasi tidak mungkin dilepaskan dari alasan-alasan ekonomis. Yang dimaksud dengan alasan ekonomis ialah pertimbangan kemanfaatan ekonomis yang akan diperoleh seseorang bila ia bergabung menjadi anggota koperasi. Tanpa alasan ekonomis, maka dasar pendirian suatu koperasi serta alasan seseorang untuk menjadi anggota koperasi menjadi sulit dipertanggung jawabkan. Adapun alasan-alasan

ekonomis mendirikan dan atau menjadi anggota koperasi dalam garis besarnya adalah sebagai berikut :

1. *Untuk menekan biaya usaha*, salah satu alasan terpenting mendirikan dan bergabung menjadi anggota koperasi adalah untuk menekan biaya usaha.
2. *Untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota*, jika sebelum ada koperasi orang sulit mendapatkan layanan yang memadai, maka melalui koperasi layanan yang diberikan menjadi lebih baik.
3. *Untuk membuka kesempatan bergabung dalam suatu badan usaha*, dengan menjadi anggota koperasi, maka orang yang bermodal kecil akan terangkat harga dirinya.

4) Alasan Yuridis

Seseorang untuk mendirikan atau bergabung menjadi anggota koperasi tidak dapat dilepaskan dari alasan yuridis. Alasan yuridis atau hukum adalah landasan yang menjamin pendirian koperasi serta pelaksanaan kegiatannya dalam suatu Negara. Alasan yuridis ini merupakan dasar yang secara langsung ikut menciptakan tumbuhnya iklim berkoperasi dalam suatu masyarakat, yaitu suatu keadaan yang memungkinkan dan mendorong rakyat banyak untuk bersatu dan bekerja sama dalam badan usaha koperasi. Secara hukum, pendirian koperasi diberbagai Negara diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Meskipun tidak semua Negara mempunyai undang-undang khusus koperasi, namun dapat dipastikan bahwa pada setiap Negara tempat koperasi tumbuh dan berkembang, terdapat peraturan yang mengatur keberadaan koperasi beserta segala hak dan kewajibannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis (Usman dan Akbar, 2004:42). Penelitian adalah salah satu cara untuk mencari kebenaran (Russeffendi, 1994:3). Jadi metode penelitian adalah cara yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan dengan langkah-langkah yang sistematis. Secara rinci langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menentukan jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta analisis data.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh gambaran mengenai pemberdayaan perempuan dalam kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) di Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Untuk memperoleh gambaran mengenai pemberdayaan perempuan dalam kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) di Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto secara menyeluruh dengan unsur-unsur pokok yang harus ditemukan sesuai dengan butir-butir rumusan masalah yang menyangkut bagaimana tingkat pemberdayaan perempuan dalam kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) di Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan perempuan dalam kegiatan simpan pinjam untuk

kelompok perempuan (SPP) di Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (narasumber) menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2013:4). Sejalan dengan definisi diatas, Kirk dan Miller (dalam Moleong 2013:4) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristiwanya. Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan fenomena dengan jalan mendeskripsikan sejumlah data yang berkenaan dengan masalah yang diteliti atau dengan kata lain adalah membuat catatan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta hasil penelitian. Pemilihan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimaksudkan agar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dirumusan masalah dilakukan dengan terjun langsung di lapangan dengan latar yang alami (*natural setting*).

Di samping itu, melalui metode penelitian deskriptif kualitatif, hasil penelitian ini dapat bersifat holistik dan mempunyai kedalaman data yang valid melalui penyajian argumen yang didapatkan dari hasil interaksi antara peneliti dengan informan. Dimana informan tersebut adalah Ketua kegiatan simpan

pinjam untuk kelompok perempuan Desa Randubango kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, Staf pengelola kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan Desa Randubango kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto,serta anggota kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan Desa Randubango kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Informan tersebut merupakan kelompok-kelompok atau individu yang memiliki keragaman latar belakang dan pengalaman, sehingga dalam mempersepsikan permasalahan seringkali memiliki makna subyektif. Dengan pengamatan yang mendalam dan menyeluruh diharapkan makna dan fenomena yang mendasari tingkah laku aktor yang terlibat serta permasalahan yang ada di rumusan masalah dapat dijawab dengan tuntas. Selain itu, jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini juga bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih kaya makna daripada sekedar data yang berbentuk angka.

B. Fokus Penelitian

Salah satu faktor penting dalam penelitian adalah menentukan fokus penelitian. Fokus penelitian juga ditujukan agar penelitian ini bisa lebih terarah dan lebih terperinci serta tidak menyimpang dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Fokus penelitian merupakan pokok permasalahan awal yang dipilih untuk diteliti dan bagaimana memfokuskannya, sehingga peneliti akan memperoleh gambaran umum (menyeluruh) tentang subyek atau situasi yang diteliti. Fokus penelitian berguna bagi penulis karena mempermudah dalam membuat keputusan yang tepat, yaitu tentang data mana yang diperlukan ataupun data mana yang tidak diperlukan dalam penulisan ini.

Perlunya fokus penelitian ini adalah untuk membatasi studi dalam penelitian sehingga obyek yang akan diteliti tidak melebar dan terlalu luas.

Pembatasan fokus akan sangat penting berkaitan dengan masalah maupun data yang akan dikumpulkan dan diolah untuk dianalisa. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan).

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai, maka dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Pemberdayaan Perempuan Dalam Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok

Perempuan (SPP).

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Pemungkinan : menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal melalui upaya bantuan modal usaha.
2. Penguatan : memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan melalui upaya kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi anggota kopwan.
3. Perlindungan : melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, dan menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan lemah melalui upaya pembekalan ide kreatif agar usaha setiap anggota beragam.

4. Pemeliharaan : memelihara kondisi yang kondusif agar tetap menjadi keseimbangan distribusi antara berbagai kelompok dalam masyarakat melalui upaya mewujudkan aspirasi anggota kopwan.

- b. Penyokong pendapatan keluarga

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pemberdayaan Perempuan Dalam Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP)

- a. Faktor pendukung

1. Adanya pengawasan dari pengelola dibidang pengawas
2. Jumlah dan aktivitas anggota

- b. Faktor penghambat

Masih rendahnya kemampuan dan pengetahuan anggota koperasi simpan pinjam (SPP)

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah letak dimana penelitian akan dilaksanakan untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam menentukan lokasi penelitian perlu dipertimbangkan apakah lokasi tersebut sesuai dengan masalah yang akan diteliti, keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya serta tenaga juga perlu dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Adapun pemilihan lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan pada kemudahan dalam obyek penelitian, disamping adanya kemudahan terhadap data yang diperlukan.

Alasan pemilihan lokasi penelitian di atas dikarenakan melalui lokasi tersebut peneliti dapat berinteraksi secara langsung dengan responden yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dalam kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Dimana kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto adalah salah satu program kegiatan simpan pinjam yang berkembang pesat. Selain itu, kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto memiliki reputasi yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan desa-desa di kecamatan Mojosari lainnya. Pencapaian prestasi tersebut tentunya tidak hanya kerja keras dari pihak pengelola saja tetapi juga tidak lepas dari partisipasi masyarakat yang menjadi anggota sehingga kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan tersebut dapat berkembang dan lebih maju.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Sumber data merupakan asal data diperoleh dari sumber tersebut dapat diberikan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pusat perhatian peneliti. Menurut Lofland (dalam Moleng, 2005:157) menjelaskan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya. data peneliti ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan pengamatan atau data yang diperoleh langsung dari wawancara dengan narasumber yang digunakan sebagai pendukung dalam melakukan analisis penelitian. Adapun subyek sebagai data primer adalah:

1. Ketua koperasi wanita “Randubango Maju”
2. Staff koperasi wanita “Randubango Maju”
3. Anggota koperasi wanita “Randubango Maju”
4. Masyarakat Desa Randubango (Bukan anggota koperasi)

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang pengumpulannya tidak diusahakan sendiri oleh peneliti dan biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, catatan-catatan, dan arsip-arsip dengan kata lain peneliti tidak terlibat langsung dalam proses penelitian tersebut. Data ini berasal dari buku, majalah, surat kabar, dan publikasi lain. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah buku dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dalam kegiatan sipan pinjam untuk kelompok perempuan.

2. Sumber Data

Sumber data yang menunjukkan dar mana peneliti mendapatkan data atau informasi yang dilakukan dalam penelitian dapat berupa orang atau benda. Menurut Lofland (dalam Moleong,2005:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data

tambahan seperti dokumen dan lainnya. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik. Maka sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi berikut:

a. Informan

Data diperoleh langsung dari sumber data asli sehubungan dengan obyek yang akan diteliti dengan mewawancarai orang dan dimintai informasi karena orang tersebut diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.

b. Peristiwa

Selain dari informan tersebut, peneliti memperoleh data atau informasi yang bersumber dari peristiwa atau fenomena yang dianggap cocok dan bermanfaat untuk menungkapkan permasalahan atau fokus penelitian.

c. Dokumen

Data ini merupakan informasi dalam bentuk catatan-catatan resmi misalnya skema dan badan keorganisasian, peraturan-peraturan tertulis ataupun arsip-arsip yang relevan dengan penelitian ini, beberapa artikel yang diakses melalui internet yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dalam simpan pinjam untuk kelompok perempuan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang dipakai oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis

dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam pengumpulan data penelitian, peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah mengadakan tanya jawab secara langsung dengan narasumber untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan fokus penelitian. Narasumber dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Ibu Dewi Wilujeng selaku Ketua Koperasi Wanita “Randubango Maju”
- b. Ibu Nurmiasih selaku Bendahara Koperasi Wanita “Randubango Maju”
- c. Ibu Heni Widiasnunik selaku Sekertaris Koperasi Wanita “Randubango Maju”
- d. Ibu Susmiati selaku Pengawas Koperasi “Randubango Maju”
- e. Ibu Nur Kholipah selaku Pengawas Koperasi Wanita “Randubango Maju”
- f. Ibu Ruswatin selaku Anggota Koperasi Wanita “Randubango Maju”
- g. Ibu Lutfiana selaku Anggota Koperasi Wanita “Randubango Maju”
- h. Ibu Kotijah selaku Anggota Koperasi Wanita “Randubango Maju”
- i. Ibu Muslikah selaku anggota Koperasi Wanita “Randubango Maju”
- j. Ibu Musni selaku bukan anggota Koperasi Wanita “Randubango Maju”
- k. Ibu Kasmuani selaku bukan anggota Koperasi Wanita “Randubango Maju”

2. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung dilokasi penelitian dengan mencatat hal-hal yang terjadi terhadap fenomena-fenomena ataupun fakta-fakta yang dijumpai yang berkaitan dengan fokus penelitian. Pada penelitian ini

observasi dilakukan dengan cara mengunjungi objek penelitian yaitu Kantor Koperasi Wanita “Randubango Maju” di Desa Randubango.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mempelajari dan menyalin dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan fokus penelitian untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi.

F. Instrumen Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian diperlukan instrumen penelitian yang mana instrumen penelitian adalah alat bantu atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam proses pengumpulan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam arti cermat dan lengkap serta sistematis sehingga mudah diolah (Arikunto, 2000:150). Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan oleh peneliti, antara lain:

1. Peneliti Sendiri (*Human Instrument*), adalah instrumen utama yang berfungsi sebagai penggali data, baik itu melalui wawancara, observasi dan dokumen-dokumen yang telah tersedia.
2. Pedoman wawancara (*interview guide*), adalah petunjuk atau pedoman yang dipergunakan oleh peneliti untuk melakukan wawancara langsung kepada responden yang berisi rangkaian pertanyaan yang akan diajukan pihak-pihak sumber dalam penelitian.
3. Perangkat penunjang lainnya, meliputi buku catatan, alat tulis menulis untuk mencatat dan alat bantu lainnya untuk merekam data-data dan informasi yang diperlukan.

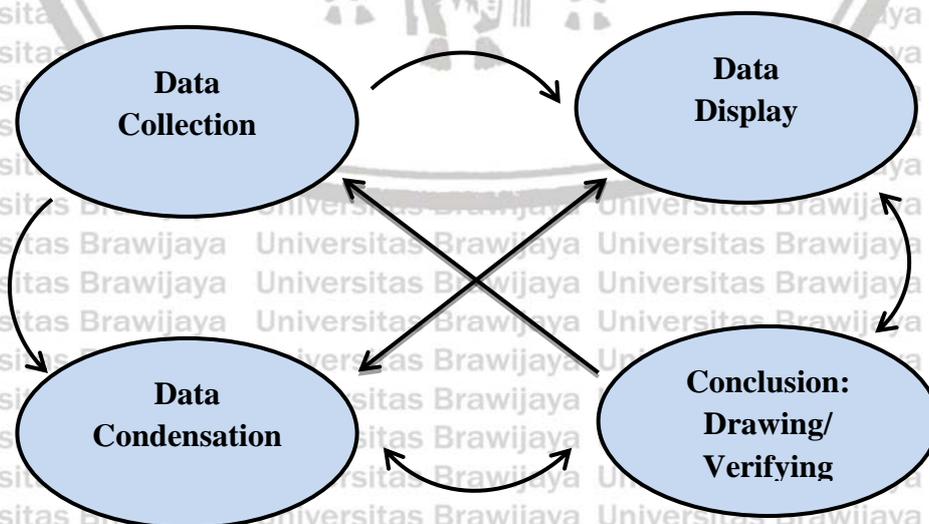
G. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan pengolahan data agar menjadi lebih sederhana, mudah dipahami, dan dapat dipergunakan untuk menggambarkan kondisi secara jelas. Analisa data dalam sebuah penelitian merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, dengan memilih data kemudian membuat kesimpulan sehingga dapat dimengerti oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2014:246).

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus dengan tiga analisis. Analisis data tersebut dengan tiga langkah yaitu (1) kondensasi data (2) display data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi.

Langkah-langkah analisis ditunjukan pada gambar berikut :

Gambar 1
Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif



Sumber : Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33)

1. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, fokus, menyederhanakan, abstrak, dan atau mengubah data yang muncul dalam korpus penuh (*body*) dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan-bahan empiris lainnya. Dengan kondensasi, kita membuat data lebih kuat. (kami tinggal jauh dari reduksi data sebagai istilah karena itu mengimplikasikan kita melemah atau kehilangan sesuatu dalam proses).

Kondensasi data terjadi terus menerus sepanjang hidup dari setiap proyek yang berorientasi kualitatif. Bahkan sebelum data tersebut diterima, antisipatif data kondensasi terjadi selaku peneliti memutuskan (sering tanpa kesadaran penuh) dimana kerangka konseptual, dimana kasus, dimana pertanyaan penelitian, dan pengumpulan data yang mendekati untuk dipilih.

Pengumpulan data hasil, episode lebih lanjut data kondensasi terjadi: menulis ringkasan, coding, tema berkembang, menghasilkan kategori, dan memo menulis analitik. Kondensasi data/proses transformasi berlanjut setelah studi lapangan selesai, sampai laporan akhir selesai (Miles, Huberman & Saldana, 2014: 31).

2. *Data Display* (Display Data)

Kegiatan analisis adalah yang kedua yaitu tampilan / display data.

Melihat display membantu kita memahami apa yang terjadi dan melakukan sesuatu baik menganalisis lebih lanjut atau mengambil tindakan berdasarkan pemahaman tersebut. Teks diperpanjang membebani kemampuan pemrosesan informasi dan memangsa kecenderungan kita untuk menemukan pola

menyederhanakan. Tampilan / display dibahas dan digambarkan di dalam buku ini meliputi berbagai jenis matriks, grafik, diagram, dan jaringan. Semua dirancang untuk mengumpulkan informasi terorganisir menjadi bentuk kompak yang langsung diakses sehingga analisis dapat melihat apa yang terjadi dan baik menarik kesimpulan dibenarkan atau pindah ke langkah analisis berikutnya yang tampilannya menunjukkan mungkin berguna.

Seperti kondensasi data, pencipta dan pengguna tampilan tidak terpisah dari analisis itu adalah bagian dari analisis. Merancang display memutuskan pada baris dan kolom darimatriks untuk data kualitatif dan memutuskan data, dalam bentuk apa, harus dimasukkan dalam sel-kegiatan analitik. (Perhatikan bahwa merancang display juga memiliki implikasi Data kondensasi yang jelas) (Miles, Huberman & Saldana 2014: 32-33).

3. *Drawing/Verifying* (Menggambarkan dan Memverifikasi Kesimpulan)

Kegiatan ketiga dalam analisis adalah menggambar kesimpulan dan verifikasi. Dari awal pengumpulan data, analisis kualitatif menafsirkan apa maksud sesuatu dengan pola mencatat, penjelasan, arus kausal, dan proposisi.

Peneliti kompeten memegang kesimpulan ini ringan, menjaga keterbukaan dan skeptisisme, tetapi kesimpulan masih ada, tidak jelas pada awalnya, kemudian semakin eksplisit dan mbumi. Kesimpulan juga diverifikasi sebagai hasil analisis. Verifikasi mungkin sesingkat berpikir dua sekilas melintasi pikiran analisis selama menulis, dengan kunjungan singkat kembali ke catatan lapangan; atau mungkin menyeluruh dan rumit, dengan argumentasi yang panjang dan review di antara rekan-rekan untuk mengembangkan

“consensus intersubjektif” atau dengan upaya luas untuk mereplikasi temuan dalam kumpulan data lain.

Pengkodean data, misalnya (kondensasi data), menyebabkan ide-ide baru tentang apa yang harus masuk matriks (display data). Memasukkan data memerlukan data kondensasi lebih lanjut. Sebagai matriks yang mengisi, kesimpulan awal yang diambil, tetapi mereka menyebabkan keputusan, misalnya, untuk menambahkan kolom lain untuk matriks untuk menguji kesimpulan. Dalam pandangan ini, analisis data kualitatif adalah terus menerus, usaha berulang. Isu kondensasi data, display, dan penarikan kesimpulan / verifikasi ikut berperan berturut-turut sebagai analisis episode mengikuti satu sama lain. Analisis kualitatif harus didokumentasikan dengan baik sebagai proses-terutama untuk membantu belajar. Perlu memahami lebih jelas apa yang terjadi ketika kita menganalisis data, untuk mencerminkan, memperbaiki metode kami, dan membuat mereka lebih umum digunakan oleh orang lain (Miles, Huberman & Saldana 2014: 33).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data Umum

1. Gambara Umum Kecamatan Mojosari

a. Visi misi

Visi kecamatan Mojosari “terwujudnya masyarakat kecamatan Mojosari yang mandiri, sejahtera dan bermartabat melalui penguatan dan pengembangan basis perekonomian, pendidikan, serta kesehatan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi pembangunan Kecamatan Mojosari untuk 5 tahun kedepan, yakni sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan semangat revolusi mental untuk memperkuat citra PNS sebagai abdi negara sekaligus pelayanan masyarakat.
2. Mewujudkan tata kelola yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan.
3. Membuka ruang komunikasi yang efektif dan efisien untu menumbuh kembangkan kepercayaan sosial dan menstimulasi kreatifitas serta inovasi masyarakat berlandaskan pada etika budaya dan kearifan lokal yang berkarakter.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara memperbesar peluang memperoleh akses pendidikan yang lebih baik untuk mengoptimalkan kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Memperbesar akses dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan keehatan yang mudah dan murah serta mampu menjangkau semua lapisan masyarakat.
6. Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektor masyarakat. (Data Kantor Kecamatan Mojosari, 1 November 2016)

b. Kondisi Geografis dan Administratif

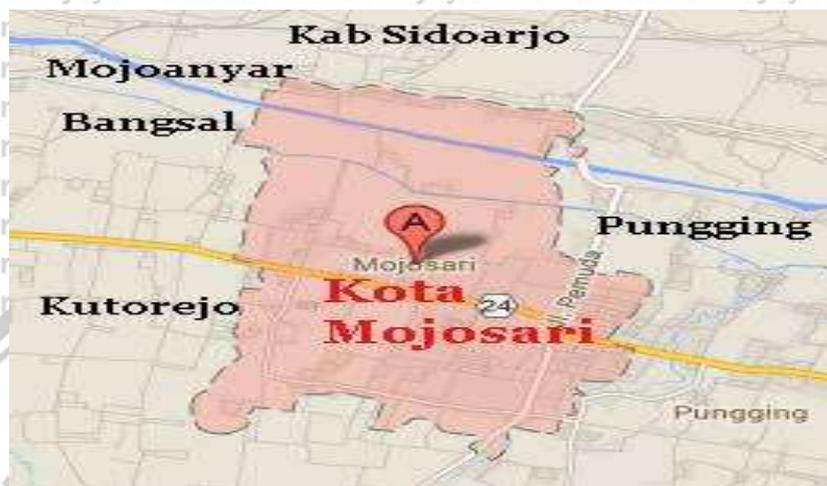
Mojosari adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat kecamatan ini berjarak 18 km sebelah timur Kota Mojokerto. Mojosari berada di Jalan Nasional Rute 24 yang menghubungkan kota Mojokerto dengan Kecamatan Gempol, Pasuruan.

Secara geografis wilayah kecamatan mojosari terletak antara $111^{\circ}23'13''$ - $111^{\circ}40'47''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}18'35''$ - $7^{\circ}46'43''$ Lintang Selatan. Wilayah geografis Kecamatan Mojosari tidak berbatasan dengan pantai, hanya berbatasan dengan wilayah kecamatan lainnya.

Kecamatan Mojosari secara adminisratif terbagi menjadi 14 Desa serta 5 Kelurahan. Luas Kecamatan Mojosari $28,85 \text{ km}^2$ dengan jumlah penduduk 77.892 dan kepadatan 2.821,8 jiwa/ km^2 .

Gambar 2

Peta Wilayah Kecamatan Mojosari



Sumber : mojokertokab.go.id (24 November 2016)

c. Topografi

Kecamatan Mojosari memiliki karakteristik topografi yang tinggi pada bagian selatan dan utara yang berupa pegunungan yang subur. Wilayah kecamatan Mojosari memiliki kemiringan tanah lebih dari 15 derajat yaitu 207,645 km², sedangkan sisanya merupakan wilayah dataran dengan tingkat kemiringan lahan kurang dari 15 derajat. Letak masing-masing kecamatan rata-rata berada dibawah 500m dari permukaan laut. (Dokumen Kecamatan Mojosari, 1 November 2016)

d. Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Mojosari berdasarkan angka sementara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2014 tercatat sebanyak 77.892 dan kepadatan 2.821,8 jiwa/km², terdiri dari laki-laki 39.458

jiwa dan perempuan 38.434 jiwa. (Dokumen Kecamatan Mojosari, 1 September 2016)

Tabel 3
Jumlah Penduduk Kecamatan Mojosari Tahun 2016

No	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Desa Awang-awang	2.192	2.012	4.204
2	Desa Belahantengah	3.747	3.142	6.889
3	Desa Jotangan	1.857	1.891	3.748
4	Desa Kebondalem	1.907	1.917	3.824
5	Desa Kedung gempol	2.181	2.031	4.212
6	Desa Leminggir	2.113	2.169	4.282
7	Desa Menanggal	3.195	3.018	6.213
8	Desa Modopuro	2.139	2.129	4.268
9	Desa Mojosulur	2.704	2.391	5.095
10	Desa Ngimbangan	1.080	2.003	3.083
11	Desa Pekukuhan	1.112	1.503	2.615
12	Desa Randubango	1.071	1.121	2.192
13	Desa Seduri	1.203	1.226	2.429
14	Desa Sumber Tanggul	1.115	1.001	2.116
15	Kel. Kauman	2.611	1.959	4.570
16	Kel. Mojosari	3.680	3.896	7.576
17	Kel. Sarirejo	1.403	1.539	2.942
18	Kel. Sawahan	2.006	2.039	4.045
19	Kel. Wonokusumo	1.856	1.769	3.625
Jumlah		39.136	38.756	77.892

Sumber : Dokumen Kantor Kecamatan Mojosari, 1 November 2016

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa penyebaran penduduk yang paling besar terdapat di Kelurahan Mojosari dengan jumlah penduduk 7.576 jiwa dari total penduduk Kecamatan Mojosari. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah Desa Sumbertanggul dengan jumlah penduduk 2.116 jiwa dari seluruh penduduk Kecamatan Mojosari.

2. Gambaran Umum Desa Randubango

a. Sejarah

Desa Randubango terdiri dari 3 dusun yang masing-masing dusun mempunyai sejarah yang berbeda. 3 dusun tersebut yaitu : Dusun Randubango, Dusun Belahan, dan Dusun Krembung Dumpul. Menurut cerita, disuatu daerah di Jawa Timur terdapat alas (hutan) yang luas dengan pepohonan yang tinggi seperti pencakar langit. Semakin hari pohon tersebut tumbuh menjadi banyak hingga memadati kawasan alas dan pohon itu adalah randu. Randu adalah pohon penghasil kapuk, buah randu yang menghasilkan kapuk berkembang tergantung musim, jika musim panas datang maka buah yang berusia tua akan berwarna coklat, kulit dari buah tersebut pecah dan mengeluarkan kapuk.

Tidak hanya pohon randu saja yang menduduki alas, melainkan bango yang lehernya panjang semakin membuat alas ini menawan. Pada musim hujan bango biasanya mengembara ke sawah untuk mencari sesuatu yang bisa dikonsumsinya yaitu anak katak atau penduduk biasanya menyebut “percil”. Bango sering mengikuti petani dibelakangnya untuk menemukan santapan spesialnya. Tentu saja hobi atau kebiasaan bango tersebut membuat petani terganggu dan bango itu diusir jauh-jauh dari sawah oleh petani. Alas randu sedikit demi sedikit ditebangi untuk dijadikan daerah perkampungan oleh para pengembara. Setelah perkampungan berkembang menjadi sebuah desa maka oleh para pembabat alas tersebut dinamakan Desa Randubango yang berasal dari kata pohon randu dan burung bango.

Para pembabat berharap kelak para pemimpin desa randubango diharapkan berasal dari dusun randubango. Penduduk awal desa randubango

mayoritas bekerja sebagai petani dan peternak bango. Penduduk makmur dan sejahtera dengan kehidupan pada saat itu. Semakin berkembangnya penduduk wilayah semakin luas karena penduduk semakin banyak. Berdasarkan pembicaraan dari mulut ke mulut wilayah tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang melambangkan tubuh dari bango. Semakin meluasnya wilayah juga karena kedatangan pendatang baru, tetapi penduduk tersebut tidak dimasukkan dalam wilayah yang dilambangkan dengan tubuh bango sehingga randubango sekarang menjadi 17 RT. Kehidupan penduduk randubango sekarang berkembang, perkembangan dusun randubango yang menjadi nama desa randubango baik perkembangan manusiannya maupun gedungnya dan juga perluasan daerahnya yang mampu menghidupi para penduduk seperti apa yang dikatakan para pembabat alas dusun randubango waktu dulu yaitu suatu saat wilayah ini dapat berkembang menjadi desa yang makmur. (Dokumen Kantor Desa Randubango, 7 November 2016)

b. Geografis Desa

Secara geografis Desa Randubango terletak pada posisi $7^{\circ}21' - 7^{\circ}31'$ Lintang Selatan Dan $110^{\circ}10' - 111^{\circ}40'$ Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 36m diatas permukaan laut. Secara administratif, Desa Randubango terletak di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Luas wilayah Desa Randubango 210,35 Ha. Luas lahan yang ada terbagi ke dalam beberapa peruntukan, yang dapat dikelompokan seperti

untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi dan lain-lain.

Luas lahan yang diperuntukkan untuk pemukiman adalah 101,07 Ha, luas lahan yang diperuntukkan untuk pertanian adalah 57,19 Ha, sedangkan sisanya dipergunakan untuk fasilitas umum misalnya perkantoran, gedung sekolah, masjid dan musolah serta pemakaman umum. Wilayah Desa Randubango secara umum mempunyai ciri geologis berupa lahan tanah berpasir yang sangat cocok sebagai lahan pertanian dan perkebunan.

c. Demografi

Berdasarkan data administrasi Pemerintah Desa Tahun 2016, jumlah penduduk Desa Randubango adalah 2.192 jiwa, dengan rincian 1.071 laki-laki dan 1.121 perempuan. jumlah penduduk demikian ini tergabung dalam 973 KK dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Di Desa Randubango

No	Usia	Jumlah	Prosentase
1	0-14	692	26,7%
2	15-49	998	46,9%
3	50 tahun keatas	502	26,4%
Jumlah Total		2.192	100%

Sumber: Dokumen Kantor Desa Randubango Tahun 2016

Tabel 5

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Randubango

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	1.071
2	Perempuan	1.121
Jumlah Total		2.192

Sumber: Dokumen Kantor Desa Randubango Tahun 2016

Dari tabel 5 diatas nampak bahwa jumlah penduduk Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto jumlah penduduk laki-laki adalah 1.071 orang dan jumlah penduduk wanita 1.121 orang.

(Dokumen Kantor Desa Randubango, 7 November 2016)

Tabel 6
Jumlah Penduduk Desa Randubango Berdasarkan Angkatan Kerja
Tahun 2016

No	Pekerjaan	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Pertanian	291	212	503
2	Peternakan	9	3	12
3	Perikanan	3	-	3
4	Buruh tani	20	13	33
5	Buruh perikanan	2	-	2
6	Buruh peternakan	2	1	3
7	Mengurus rumah tangga	7	421	428
8	Biarawati	-	1	1
9	Buruh harian	11	13	24
10	Guru	16	12	28
11	Industri	8	5	13
12	Karyawan BUMN	2	-	2
13	Karyawan honorer	7	4	11
14	Karyawan swasta	58	63	121
15	Kepala desa	-	1	1
16	Perangkat desa	7	3	10
17	Polisi	2	-	2
18	Konstruksi	3	-	3
19	Mekanik	3	-	3
20	Paraji	1	-	1
21	Pedagang	16	13	29
22	PNS	18	11	29
23	Pelaut	1	-	1
24	Pembantu rumah tangga	1	9	10
25	Tukang kayu	3	-	3
26	Penata rambut	-	2	2

27	Pensiunan	5	2	7
28	Perawat	3	5	8
29	Sopir	5	-	5
30	TNI	3	-	3
31	Transportasi	3	-	3
32	Tukang batu	3	-	3
33	Tukang jahit	1	4	5
34	Tukang Las	2	-	2
35	Ustadz	3	-	3
36	Wiraswasta	30	17	47
37	Bidan	-	3	3
38	Juru masak	-	1	1
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
39	Penata busana	-	1	1
40	Lain-lain	9	7	16
Jumlah Total		556	827	1.383

Sumber: Dokumen Kantor Desa Randubango, 7 November 2016

Dari data tabel 6 diatas nampak bahwa jumlah penduduk Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto sebagian adalah ibu rumah tangga dan juga bergabung dalam Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP).

Tabel 7

Daftar anggota kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan

“Randubango Maju“ Desa Randubango Tahun 2016

No	Nama	Jabatan dalam Kelompok	Alamat
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Dewi wilujeng	Ketua	Dsn. Belahan
2	Nurmiasih	Bendahara	Dsn. Krembung Dumpul
3	Heni widiasnunik	Sekretaris	Dsn. Randubango
4	Nur qolifah	Pengawas	Dsn. Randubango
5	Susmiati	Pengawas	Dsn. Belahan
6	Suwaibah	Anggota	Dsn. Randubango
7	Lilik suheni	Anggota	Dsn. Randubango
8	Siti supiyani	Anggota	Dsn. Randubango
9	Jumiati	Anggota	Dsn. Randubango

10	Masfufah	Anggota	Dsn. Randubango
11	Lilik sukarlik	Anggota	Dsn. Randubango
12	Ike	Anggota	Dsn. Randubango
13	Siti rujamah	Anggota	Dsn. Randubango
14	Emi masudah	Anggota	Dsn. Randubango
15	Ruswati	Anggota	Dsn. Randubango
16	Surianah	Anggota	Dsn. Randubango
17	Anik tamaroh	Anggota	Dsn. Randubango
18	Sri asmulik	Anggota	Dsn. Randubango
19	Nuroikhah	Anggota	Dsn. Randubango
20	Wulan	Anggota	Dsn. Randubango
21	Chotimah	Anggota	Dsn. Belahan
[1]	[2]	[3]	[4]
22	Anik puspito rini	Anggota	Dsn. Belahan
23	Fiki	Anggota	Dsn. Randubango
24	Mia	Anggota	Dsn. Randubango
25	Erna puji rahayu	Anggota	Dsn. Belahan
26	Muda,ah	Anggota	Dsn. Belahan
27	Siti aminatus	Anggota	Dsn. Belahan
28	Dewi ngasilowati	Anggota	Dsn. Belahan
29	Latifah	Anggota	Dsn. Belahan
30	Wiwik	Anggota	Dsn. Belahan
31	Suntiani	Anggota	Dsn. Belahan
32	Rawati	Anggota	Dsn. Belahan
33	Simpem	Anggota	Dsn. Belahan
34	Rufiah	Anggota	Dsn. Randubango
35	Astutik	Anggota	Dsn. Randubango
36	Alfiyah	Anggota	Dsn. Krembung dumpul
37	Sri ningsih	Anggota	Dsn. Krembung dumpul
38	Cicik	Anggota	Dsn. Krembung dumpul
39	Dwi rahmawati	Anggota	Dsn. Krembung dumpul
40	Lusi	Anggota	Dsn. Belahan
41	Winarsih	Anggota	Dsn. Krembung dumpul
42	Sisil	Anggota	Dsn. Krembung dumpul
43	Umi faridah	Anggota	Dsn. Krembung dumpul
44	Erik	Anggota	Dsn. Krembung dumpul
45	Sampini	Anggota	Dsn. Belahan
46	Tari	Anggota	Dsn. Belahan
47	Kusnah	Anggota	Dsn. Randubango
48	Kasmiatun	Anggota	Dsn. Randubango
49	Umi andari	Anggota	Dsn. Randubango
60	Rohma	Anggota	Dsn. Randubango
61	Anik minarsih	Anggota	Dsn. Randubango
62	Wiwik ningsih	Anggota	Dsn. Randubango
63	Nita	Anggota	Dsn. Belahan
64	Kasih	Anggota	Dsn. Belahan

65	Juwenik	Anggota	Dsn. Belahan
66	Uribah	Anggota	Dsn. Belahan
67	Anis	Anggota	Dsn. Randubango
68	Pipit	Anggota	Dsn. Randubango
69	Saropah	Anggota	Dsn. Randubango
70	Riati	Anggota	Dsn. Randubango
71	Muslimah	Anggota	Dsn. Randubango
72	Sartini	Anggota	Dsn. Belahan
73	Likah	Anggota	Dsn. Belahan
74	Sutrah	Anggota	Dsn. Belahan
75	Supiati	Anggota	Dsn. Krembung dumpul
76	Suryati	Anggota	Dsn. Belahan
[1]	[2]	[3]	[4]
77	Dwi agung	Anggota	Dsn. Belahan
78	Atik novita	Anggota	Dsn. Randubango
79	Sri astutik	Anggota	Dsn. Randubango
80	Ani	Anggota	Dsn. Belahan
81	Istik	Anggota	Dsn. Krembung dumpul
82	Luntik	Anggota	Dsn. Krembung dumpul
83	Jenny	Anggota	Dsn. Randubango
84	Dwi yarti	Anggota	Dsn. Randubango
85	Purwati	Anggota	Dsn. Belahan
86	Lutfiana	Anggota	Dsn. Belahan
87	Vivi	Anggota	Dsn. Belahan
88	Sendi	Anggota	Dsn. Belahan
89	Suparti	Anggota	Dsn. Belahan
90	Peni	Anggota	Dsn. Belahan
91	Laila	Anggota	Dsn. Belahan
92	Win ndoko	Anggota	Dsn. Belahan
93	Nurhayati	Anggota	Dsn. Krembung dumpul
94	Kus roikah	Anggota	Dsn. Belahan
95	Pipit imel	Anggota	Dsn. Belahan
96	Yanu	Anggota	Dsn. Belahan
97	Riyem	Anggota	Dsn. Belahan
98	Taslimah	Anggota	Dsn. Randubango
99	Kolifah	Anggota	Dsn. Krembung dumpul
100	Waraswati	Anggota	Dsn. Belahan
101	Ratna	Anggota	Dsn. Belahan
102	Tri	Anggota	Dsn. Krembung dumpul
103	Siamah	Anggota	Dsn. Randubango
104	Susampeni	Anggota	Dsn. Randubango
105	Lilik sri	Anggota	Dsn. Randubango
106	Kasnah	Anggota	Dsn. Belahan
107	Pustanti	Anggota	Dsn. Belahan
108	Nuryatim	Anggota	Dsn. Randubango
109	Ninik laundry	Anggota	Dsn. Belahan

110	Ida	Anggota	Dsn. Randubango
111	Endang	Anggota	Dsn. Belahan
112	Ina	Anggota	Dsn. Belahan
113	Mike	Anggota	Dsn. Belahan
114	Anita	Anggota	Dsn. Belahan
115	Hani	Anggota	Dsn. Belahan
116	Dyah	Anggota	Dsn. Krembung dumpul
117	Puspa	Anggota	Dsn. Belahan
118	Irma	Anggota	Dsn. Krembung dumpul
119	Taini	Anggota	Dsn. Belahan
120	Kotijah	Anggota	Dsn. Belahan
121	Solikah	Anggota	Dsn. Belahan
[1]	[2]	[3]	[4]
122	Nikmah	Anggota	Dsn. Belahan
123	Rusmiati	Anggota	Dsn. Belahan
124	Midah	Anggota	Dsn. Belahan
125	Sely	Anggota	Dsn. Krembung dumpul
126	Puput	Anggota	Dsn. Randubango
127	Lilik	Anggota	Dsn. Belahan
128	Erna sulistio	Anggota	Dsn. Randubango
129	Yani	Anggota	Dsn. Randubango
130	Tinuk	Anggota	Dsn. Belahan
131	Kasuni	Anggota	Dsn. Belahan
132	Ifah	Anggota	Dsn. Krembung dumpul
133	Onik	Anggota	Dsn. Belahan

Sumber : Buku daftar anggota KOPWAN "Randubango Maju" Tahun 2016

Dari data tabel 7 diatas Nampak bahwa jumlah anggota kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan setiap tahunnya meningkat.

d. Keadaan Sosial

1. Pendidikan

Eksistensi pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat ekonomi pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah dalam pengentasan

kemiskinan dan pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika berpikir atau pola pikir individu, selain mudah menerima informasi yang lebih maju dan tidak gagap teknologi. (RPJMDesa tahun 2015-2020)

Dibawah ini adalah tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Randubango.

Tabel 8

Pendidikan Terakhir Penduduk Desa Randubango

No	Keterangan	Jumlah
1	Tidak tamat SD	98
2	Tamat SD	163
3	Tamat SMP	639
4	Tamat SMA	951
5	Tamat Perguruan Tinggi	87
Jumlah Total		1.938

Sumber : RPJMDesa Randubango tahun 2015-2020

Rentetan data kualitatif di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Randubango hanya mampu menyelesaikan sekolah jenjang pendidikan wajib belajar Sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri. Sebab ilmu pengetahuan setara dengan kekuasaan yang akan berimplikasi pada penciptaan kebaikan kehidupan.

Rendahnya kualitas pendidikan di Desa Randubango tidak terlepas dari terbatasnya ekonomi dan pandangan hidup masyarakat.

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternative bagi persalannya rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Randubango yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Randubango. Bahkan beberapa lembaga bimbel dan pelatihan yang pernah ada malah gulung tikar. Mungkin dorongan dari pemerintah dan masyarakat masih sangat lemah. Inilah yang menjadi pekerjaan dasar pemerintahan Desa Randubango sekarang ini.

2. Kesehatan

Masalah kesehatan adalah hak setiap manusia dan merupakan aset yang sangat penting bagi masa depan bangsa secara umum. Masyarakat yang produktif adalah masyarakat yang sehat fisik dan mentalnya. Salah satu cara untuk mengukur status kesehatan masyarakat adalah mencermati banyaknya masyarakat yang terserang penyakit. Dalam bidang kesehatan, masyarakat Randubango perlu adanya usaha untuk meningkatkan kualitas kesehatan melalui kegiatan yaitu posyandu lansia. Dengan adanya posyandu lansia, maka kebutuhan gizi dapat tercukupi dan mengetahui, memantau dan memprediksi gejala-gejala penyakit yang timbul dan dapat mencegahnya secara dini. Adapun kegiatan posyandu lansia antara lain :

- 1) Penimbangan
- 2) Kontrol tekanan darah
- 3) Senam lansia
- 4) Pemberian gizi
- 5) Pemberian vitamin dan obat-obatan
- 6) Penyuluhan tentang pola hidup sehat

- 7) Renungan kerohanian
- 8) Pemberian makanan dan buah-buahan sebagai contoh pola hidup sehat
- 9) Penindak lanjutan bagi lansia yang perlu perawatan

e. Keadaan Ekonomi

Potensi perekonomian masyarakat secara umum dapat dilihat dari mata pencaharian warga masyarakat Desa Randubango dapat teridentifikasi kedalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industry rumah tangga, dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian dengan rincian sebagai pemilik sawah berjumlah 233 Orang, petani penyewa/penggarap berjumlah 297 Orang, sedangkan sebagai buruh tani berjumlah 713 Orang. Yang bekerja disektor peternakan dengan rincian peternak sapi 2 orang, peternak kambing 5 orang, peternak ayam 13 orang, yang bekerja disektor industri dengan rincian sebagai pemilik usaha 8 orang, pemilik industri rumah tangga 5 orang, dan buruh industri sebanyak 235 orang, serta yang bekerja pada bidang lain-lain yaitu sebanyak 16 orang.

Kemudian yang bekerja di bidang jasa dengan rincian sebagai PNS 29 orang, padagang besar 15 orang, pedagzang kecil 12 orangDenyut nadi perekonomian desa sangat ditunjang dengan keberadaan pasar desa yang membantu menggerakkan peredaran uang yang sangat berarti. Inilah yang secara langsung hasil transaksi pertanian dari desa maupun luar desa menjadikan potensi pasar besar.Dengan melihat data diatas maka angka pengangguran di Desa Randubango masih cukup tinggi. (RPJMDesa 2015-2020)

f. Kondisi Pemerintahan

1. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Randubango terbagzi di dalam 46 Rukun Tetangga

(RT) dan 12 Rukun Warga (RW) yang tergabung didalam 3 Dusun yaitu :

Dusun Randubango, Dusun Belahan, Dusun Krembung dumpul, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kepala Dusun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. (RPJMDesa tahun 2015-2020)

2. Struktur Organisasi Pemerinta Desa

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Randubango memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level diatasnya. Dari kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah Rukun Warga terbentuk. Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Randubango tidak bisa lepas dari struktur adzministrative pemerintahan pada level diatasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

Gambar 3

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Randubango



Pembantu Umum

Kasun 1

Kasun 2

Kasun 3

*Sumber : RPJMDesa Randubango tahun 2015-2020***Tabel 9****Pejabat Pemerintah Desa Randubango**

No	Nama	Jabatan
1	Chotimah, S. Ag	Kepala Desa
2	Samsul Ma'arif, S. H	Sekretaris Desa
3	Priyoko	Staf Urusan Pemerintahan
4	Trisia Imdarwati, SPd	Staf Urusan Keuangan
5	Abdul Kadir	Staf Urusan Pembangunan
6	Ilmiyawatim, S. Pdi	Seksi Urusan Umum
7	Kusnan	Kasun Randubango
8	Widanuroso	Kasun Belahan
9	Ruman	Kasun Krembung Dumpul

*Sumber : Kantor Desa Randubango 2016***Tabel 10****Badan Permusyawaratan Desa Randubango**

No	Nama	Jabatan
1	H. Suparno, S. Pd	Ketua
2	Hj. Endang Yuliasih	Sekretaris
3	Rudi, S. Pd	Bendahara
4	Susmiati	Anggota
5	Hartono, SH	Anggota
6	Erna Puji Rahayu	Anggota
7	Supijarniwati	Anggota

8	M. Kusaeri	Anggota
9	Samsul Huda	Anggota
10	Dewi Kusmawati	Anggota

Sumber : Kantor Desa Randubango 2016

Pelayanan pemerintahan desa randubango senantiasa berupaya memberikan pelayanan yang memuaskan meski disadari banyak kekurangan, namun dilandasi dengan transparansi dan mengedepankan pelayanan masyarakat yang bisa dipertanggungjawabkan. Pengembangan dan pelatihan bagi aparat pemerintah desa merupakan upaya meningkatkan peran dan fungsi perangkat desa dalam memberikan pelayanan masyarakat. Demikian juga pemenuhan terhadap alat penunjang pelayanan, seperti komputer, ATK yang senantiasa dilengkapi setiap tahun. Secara umum, pelayanan pemerintahan Desa Randubango kepada masyarakat terbilang memuaskan. Beberapa warga menyatakan bahwa pelayanan umum seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dapat dikerjakan dengan cepat dalam waktu 24 jam. Begitu pula untuk pengurusan surat-surat penting lainnya seperti akta kelahiran dan akta kematian, sehingga secara umum masyarakat merasa terlayani secara baik. (RPJMDesa tahun 2015-2020)

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Pemberdayaan Perempuan Dalam Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP) Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto

Kabupaten Mojokerto memiliki potensi sumber daya alam yang cukup baik dan belum dimanfaatkan secara maksimal khususnya untuk

pengembangan pertanian. Disisi lain dengan semakin berkembang pesatnya pembangunan yang ada maka telah terjadi persaingan pemanfaatan lahan, dari lahan pertanian telah berubah menjadi lahan non pertanian sehingga dari tahun ke tahun lahan pertanian terus menyusut, sedangkan permintaan kebutuhan hidup sehari-hari semakin meningkat. Dengan adanya hal seperti itu maka perlu adanya pemberdayaan untuk menciptakan sesuatu yang baru agar roda perekonomian terus berputar dengan lancar sehingga kebutuhan dapat terpenuhi.

Suatu pelaksanaan dari suatu pemberdayaan pasti memiliki output dan outcome. Output dari pemberdayaan ini adalah lahan pekarang jadi bermanfaat karena dimanfaatkan untuk berbagai peluang usaha, meningkatnya keterampilan wanita dengan berinovasi menciptakan olahan menu makanan dari hasil pekarangan, dan meningkatkan penghasilan rumah tangga. Sedangkan outcome dari pemberdayaan ini adalah dengan adanya kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan yang mengadakan penyuluhan dan pelatihan, maka wanita di desa randubango jadi terlatih keterampilannya dan kesejahteraannya meningkat karena kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi.

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Koperasi merupakan salah satu lembaga simpan pinjam dana non bank. Dana koperasi didapat melalui simpanan warga yang merupakan simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Koperasi pada umumnya dibentuk untuk jumlah keuangan skala mikro. Koperasi bertujuan mendidik anggotanya untuk giat menabung agar memperoleh

modal usaha dengan mudah, menjauhkan anggota dari pinjaman uang dengan suku bunga yang besar, membantu keperluan kredit dengan syarat-syarat yang ringan tanpa menggunakan anggunan.

Pengelola koperasi wanita di Desa Randubango mengadakan sosialisasi setiap bulan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi kaum perempuan agar lebih memahami pengertian, tujuan dan manfaat koperasi. Dengan adanya koperasi maka masyarakat dapat membangun usaha dengan mandiri. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini dapat memotivasi masyarakat khususnya kaum perempuan agar mereka dapat terus aktif didalam kegiatan ekonomi demi pembangunan dan kesejahteraan mereka sendiri.

1. Pemungkinan : Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal melalui upaya bantuan modal usaha

Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat agar berkembang secara optimal diperlukan usaha-usaha yang menyadarkan dan menanamkan pengertian kepada masyarakat agar dapat menggunakan dengan lebih baik semua kemampuan yang dimiliki, baik tenaga ataupun menggali inisiatif untuk lebih banyak melakukan kegiatan investasi dalam mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Dalam hal ini, peran Koperasi Wanita “Randubango Maju” Desa Randubnago sangat berpengaruh. Selain bias mengajukan pinjaman untuk modal usaha, masyarakat juga bisa berinvestasi di koperasi wanita tersebut. Hal ini

sesuai dengan pernyataan Ibu Ruswati selaku anggota koperasi wanita “Randubango Maju”. Adapun pernyataannya sebagai berikut :

“selain meminjam modal usaha dari koperasi saya juga investasi di koperasi mbak. Lebih enak nabung dikoperasi daripada di bank mbak, dibank banyak potongannya, kalau dikoperasi kan nggak ada potongan, malah kalau RAT saya dapat bunga dari investasi saya. Jadi dapat SHU dari pinjaman sama SHU dari investasi. Kalau didepositokan dibank ruwet ngurusnya mbak, enak di koperasi sewaktu-waktu mau ngambil nggak apa-apa”. (wawancara Ibu Ruswati, 13 September 2016 pukul 15.30 wib dirumahnya)

Memungkinkan menciptakan potensi masyarakat desa dinilai sangat sulit. Namun sesungguhnya masyarakat desa memiliki banyak potensi seperti tersedianya lahan pertanian, ternak dan perikanan yang melimpah. Apabila dimanfaatkan dengan baik, tentu potensi desa ini akan dapat memperbaiki ekonomi mereka. Sayangnya, memang ada beberapa kelemahan mereka misalnya, pola konsumtif yang cukup tinggi, serta lebih mengedepankan hal-hal praktis saja. Untuk mengubah pola hidup masyarakat Desa Randubango diperlukan proses membangun daya kritis mereka. Selain mengetahui apa yang menjadi kelemahan, mereka juga perlu disadarkan bahwa mereka memiliki kekuatan. Mereka memiliki lahan pekarang , ini dapat mereka manfaatkan dengan tanaman sayuran baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk dijual. Begitu juga ternak, mereka bisa menjualnya langsung ataupun diolah. Kotoran ternak pun juga dapat diolah menjadi pupuk. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Lutfiana selaku anggota Koperasi Wanita “Randubango Maju”. Adapun pernyataannya sebagai berikut :

“saya dapat pinjaman modal dari koperasi dan dapat sosialisasi tentang membuka usaha. Jadi saya memanfaatkan lahan dibelakang rumah buat kolam lele, hasilnya lumayan bisa untuk lauk sendiri, dan bisa juga dijual kepasar kalau sudah panen. Awal peminjaman modal sebesar 2.000.000 dengan cicilan selama 12 kali sebesar 210.000 setiap bulannya, dengan modal tersebut saya bisa membuat kolam lele terpal. Awal panen belum bisa dapat keuntungan tp setidaknya sudah bisa balik modal mbak. Satu kolam itu isinya 100 kg benih ikan lele yang siap panen dalam waktu empat bulan dengan harga Rp. 16.500 per kilo. 100 kg ikan \times 16.500 = 1.650.000,- Pendapatan 3 kali panen yaitu $1.650.000 \times 3 = 4.950.000,-$ Hasil dari panen selama satu tahun sebesar 4.950.000 dikurangi 2 kali beli benih, jadi $4.950.000 - 2.400.000 = 2.550.000,-$ Tahun pertama belum bisa dapat untung tapi alhamdulillah bisa terus berkembang usaha saya. Sekarang sudah bisa menikmati hasil karena sudah bisa budidaya bibit sendiri”. (Wawancara Ibu Lutfiana, 14 September 2016 pukul 10.00 wib dirumahnya)

Melihat hasil wawancara diatas tergambar bahwa masyarakat

Desa Randubango sebenarnya memiliki potensi yang bisa berkembang.

Mereka dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik, segala kebutuhan

bisa dipenuhi, dan semua masyarakat akan sejahtera. Jika kondisi tersebut

dapat diwujudkan secara terus-menerus maka hampir semua rumah

tangga tidak ada lagi yang kekurangan pangan. Mereka dapat

memperolehnya dari produksi pemanfaatan lahan pertanian sehingga

kebutuhan dapat dipenuhi.

2. Penguatan : Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan melalui upaya kegiatan pendidikan dan pelatihan anggota kopwan

Keunggulan suatu organisasi dapat dilihat dari kualitas Sumber

Daya Manusia (SDM) yang menjalankan organisasi tersebut. Kapabilitas

atau sering disebut sebagai kompetensi dan komitmen Sumber Daya

Manusia (SDM) sebagai fungsi atau modal manusia sebagai pengaruh untuk membangun keunggulan kompetitif. Untuk bersaing di lingkungan bisnis yang kompetitif, diperlukan SDM koperasi yang memiliki kapabilitas unggulan dan komitmen yang kuat. Sumber daya manusia (SDM) diperlukan untuk membangun proses internal organisasi dalam menciptakan pelayanan untuk membangun anggota, yang didukung dengan organisasi yang kuat. Pemberdayaan dan partisipasi anggota akan menghasilkan pendapatan dan modal yang berlipat serta menghasilkan efisiensi biaya yang signifikan, sehingga akan meningkatkan kemakmuran dalam bentuk manfaat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Dewi Wilujeng yang selaku Ketua Koperasi “Randubango Maju”. Adapun pernyataannya sebagai berikut.

“organisasi yang memiliki sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi tinggi tetapi komitmennya rendah tidak akan berjalan dengan lancar. Kompetensi yang tinggi harus didukung dengan komitmen yang tinggi pula, agar dapat menghasilkan kinerja koperasi yang tinggi akan memberikan manfaat bagi anggota, sehingga kepercayaan anggota dan pihak lain (Penanam Modal) akan meningkat, dengan demikian insentif anggota akan meningkat serta kepercayaan pihak ketiga dalam pemberian pinjaman dan pemupukan modal pinjaman”. (Wawancara Ibu Dewi Wilujeng, Ketua Koperasi “Randubango Maju” Desa Randubango, 5 September 2016 pukul 10.00 WIB di Balai Desa Randubango)

Pendidikan dan pelatihan dalam upaya untuk meningkatkan kompetensi dan komitmen SDM koperasi menjadi sesuatu yang sangat kritis untuk dilaksanakan, tidak hanya karena merupakan salah satu prinsip koperasi. Program pendidikan dan pelatihan bagi SDM koperasi, yang selama ini diprogramkan selalu berkaitan dengan kompetensi SDM dalam mengelola usaha koperasi, maka mulai saat ini pendidikan dan

pelatihan bagi SDM koperasi diutamakan dalam upaya meningkatkan komitmen pada organisasi koperasi. Kompetensi dan komitmen Sumber Daya Manusia koperasi dalam melaksanakan organisasi koperasi akan menentukan tingkat keberhasilan koperasi. Oleh sebab itu kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan Desa Randubango selalu mengirim pengelola koperasi dan anggota koperasi untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kecamatan maupun oleh Dinas Koperasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Susmiati selaku Pengawas Koperasi “Randubango Maju” Desa Randubango. Adapun pernyataannya sebagai berikut.

“Kita sebagai pengurus kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan setiap tiga bulan sekali selalu mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh kecamatan atau dinas koperasi, kami juga me *rolling* anggota secara bergantian untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan agar semua anggota mendapat pengetahuan dan wawasan yang lebih tinggi mengenai kopwan. Karena kita para pengurus kegiatan selalu menerapkan dan menanamkan komitmen Sumber Daya Manusia (SDM) yang tinggi, dengan komitmen yang tinggi koperasi akan memperoleh keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki koperasi lain”. (Wawancara Ibu Susmiati, Pengawas Koperasi “Randubango Maju” Desa Randubango, 5 September 2016 pukul 16.00 WIB di rumahnya)

Sumber daya manusia koperasi akan memprioritaskan kepentingan organisasi koperasi diatas kepentingannya sendiri sehingga secara umum produktivitas akan meningkat. Mereka juga bersedia bersedia bergabung dengan koperasi dalam jangka panjang, serta menyesuaikan sikap dan perilakunya dengan strategi yang diterapkan koperasi. Manfaat-manfaat inilah yang akan menjadi daya saing koperasi yang tidak mudah diikuti oleh pesaingnya. Setelah komitmen sumber

daya manusia meningkat, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM koperasi perlu dilaksanakan karena kedua sangat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja koperasi.

3. Perlindungan : Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, dan menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan lemah melalui upaya pembekalan ide kreatif agar usaha setiap anggota beragam

Keberadaan badan hukum koperasi erat sekali kaitannya dengan sistem perekonomian yang berada di Indonesia. Yang mana pada saat ini setiap individu diupayakan untuk mempunyai usaha sendiri karena tuntutan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari lebih berkembang. Untuk itu perlu didirikannya koperasi bertujuan membantu calon pengusaha-pengusaha kecil agar dapat menjalankan kegiatan usahanya demi tercapainya tujuan kesejahteraan rakyat. Adanya koperasi saat ini sangatlah diperlukan untuk menunjang kegiatan ekonomi para anggotanya terutama untuk mendapatkan pinjaman modal usaha selain hal tersebut dapat diperoleh dari lembaga perbankan.

Koperasi menyediakan layanan simpan pinjam terutama bagi anggotanya, prosedurnya pun tidaklah serumit di lembaga perbankan

dikarenakan dalam kegiatan kredit koperasi tidak begitu dipersyaratkan adanya jaminan terutama jaminan kebendaan. Dalam Koperasi Wanita “Randubango Maju” Desa Randubango ini sendiri menggunakan system kepercayaan. Sistem kepercayaan digunakan karena koperasi tidak mengutamakan jaminan kebendaan sebagai syarat pencairan pinjaman seperti di lembaga keuangan. Sistem kepercayaan adalah tanggung jawab bersama diantara anggota atau di satu kelompok atas segala kewajiban mereka terhadap koperasi dengan berdasarkan keterbukaan dan saling percaya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Dewi Wilujeng selaku Ketua Koperasi Wanita “Randubango Maju” Desa Randubango. Adapun pernyataannya adalah sebagai berikut :

“Di koperasi kami (Kopwan “Randubango Maju”) ini syarat dan prosedurnya sangat mudah mbak, kita sebagai pengelola nggak mau mempersulit, soalnya mereka (anggota) nanti nggak paham. Kalau mau pengajuan modal ya syaratnya gampang aja, Cuma fotocopy KTP suami istri, tabungan wajib sebesar 100ribu dan biaya administrasi. Tabungan wajib itu nanti kalau sudah keluar dari keanggotaan kami kasihkan lagi, tapi sejauh ini Alhamdulillah belum ada yang keluar dari anggota koperasi”. (Wawancara Ibu Dewi Wilujeng, Ketua Koperasi Wanita “Randubango Maju” Desa Randubango, 5 September 2016 pukul 10.00 wib di Balai Desa Randubango)

Dalam hal ini, koperasi wanita “Randubango Maju” Desa Randubango tidak hanya berpegang pada sistem kepercayaan. Koperasi Wanita ini juga memiliki badan hukum yang bisa melindungi organisasi kopwan dan juga melindungi anggota didalamnya. Yakni yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Selain itu, penciptaan iklim usaha bagi usaha kecil yang diperuntukkan

bagi warga miskin sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan yang menekankan pada usaha mencapai kesejahteraan yang dilakukan dengan cara gotong royong dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Oleh sebab itu, pengelola koperasi wanita membekali anggotanya pengetahuan dan modal agar dapat bersaing dengan sehat dan tidak ada yang tertindas antara yang kuat dengan yang lemah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Nurmiasih selaku Bendahara Koperasi Wanita “Randubango Maju” Desa Randubango. Adapun pernyataannya sebagai berikut :

“kami membekali anggota dengan ide-ide kreatif yang nantinya bisa jadi usaha dan menghasilkan penghasilan, misalnya budidaya jamur, jamur kan nggak perlu tempat yang luas, jadi yang punya tempat sempit pun bisa buka usaha, ada yang budidaya jamur kami menyarankan tetangganya agar buat olahan jamur misalnya keripik jamur, jadi biar tidak ada persaingan dan saling gotong royong untuk sejahtera bersama. Begitu pun untuk yang buka toko, kami sarankan agar menjual kebutuhan pokok yang biasanya dicari ibu-ibu dalam kondisi mendesak, supaya toko-toko yang besar juga tidak merasa tersaingi”. (Wawancara Ibu Nurmiasih, Bendahara Koperasi Wanita “Randubango Maju” Desa Randubango, 11 September 2016 pukul 10.00 wib di rumahnya)



Gambar 4. Hasil budidaya jamur anggota kopwan "Randubango Maju"

Sumber : Data primer hasil penelitian tahun 2016



Gambar 5. Hasil olahan dari jamur (Keripik Jamur) anggota kopwan "Randubango Maju"

Sumber : Data primer hasil penelitian tahun 2016

Dalam wawancara dengan Ibu Onik selaku anggota dari koperasi wanita "Randubango Maju" yang membuka usaha keripik jamur. Adapun pernyataannya sebagai berikut :

"Saya mendaftar jadi anggota koperasi biar tidak nganggur dirumah mbak, saya lihat tetangga yang jadi anggota sekarang sudah punya penghasilan sendiri jadi enak, makanya saya juga ingin kayak mereka. Pinjaman modal awal saya sebesar 1.000.000 terus diberi usulan sama pengelola agar usaha keripik jamur soalnya anggota koperasi ada yang budidaya jamur jadi biar enak saling bantu membantu. Beli jamur 40kg harga 520.000 (13.000 per kg), dengan 40 kg jamur bisa jadi 80 bungkus kemasan 500gr yang saya jual 8000 per bungkus. Dalam satu bulan saya biasanya delapan kali produksi mbak, seminggu dua kali. Jadi, $8(\text{produksi}) \times 640.000 (80 \text{ bungkus} @ 8.000) = 5.120.000,-$ Hasil $5.120.000 - 4.160.000(\text{modal jamur segar } 8x \text{ produksi}) = 960.000 - 110.000 (\text{angsuran koperasi}) = 850.000,-$. Jadi penghasilan saya Rp. 850.000 per bulan. Lumayan mbak yang tadinya saya nganggur urus anak aja sekarang bisa ada kesibukan dan bisa bantu penghasilan keluarga". (Wawancara Ibu Onik, Anggota Koperasi Wanita

“Randubango Maju” Desa Randubango, 12 September 2016
pukul 10.00 wib di rumahnya)

Koperasi wanita “Randubango Maju” Desa Randubango selain meminjamkan modal usaha juga membantu agar masyarakat Desa Randubango khususnya kaum perempuan dapat mengasah kreatifitas dan inovasi agar dapat membantu mensejahterahkan keluarga.

4. Pemeliharaan : memelihara kondisi yang kondusif agar tetap menjadi keseimbangan distribusi antara berbagai kelompok dalam masyarakat melalui upaya mewujudkan aspirasi anggota kopwan

Memelihara kondisi yang kondusif harus dilakukan melalui cara pendekatan komunikasi yang tepat. Tujuan agar setiap gagasan dalam organisasi dapat dipahami secara efektif oleh seluruh anggota. Hal ini dapat memberikan sebuah harapan bahwa setiap organisasi dapat berkembang searah dengan yang diinginkan. Pengelola memiliki tugas untuk meningkatkan kinerja dan eksistensi koperasi wanita guna mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Untuk dapat mencapai dengan maksimal, banyak hal yang harus dilakukan oleh pengelola. Membangun sinergi yang mendukung antar pengelola dan pengelola, antar pengelola dan anggota, serta anggota dan anggota. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Susmiati selaku Pengawas Koperasi Wanita “Randubango Maju” Desa Randubango. Adapun pernyataannya adalah sebagai berikut :

“upaya kami sebagai pengelola selalu menampung aspirasi anggota, dan satu per satu akan kami laksanakan selagi itu berdampak baik bagi koperasi ini. Setiap bulannya kami mengadakan pertemuan yang tujuannya adalah memberi arahan dan ide usaha pada anggota koperasi, agar setiap anggota koperasi

tidak menjalankan usaha yang sama. Hal ini karena jika ada usaha yang sama dalam satu dusun bisa mengakibatkan dampak yang negative, oleh sebab itu kami sebagai pengelola koperasi juga senantiasa memberi arahan pada anggota kami agar situasi yang sudah terbangun lama tetap kondusif”. (Wawancara Ibu Susmiati, Pengawas Koperasi Wanita “Randubango Maju” Desa Randubango, 5 September 2016 pukul 16.00 wib di rumahnya)

Produktivitas anggota ditentukan oleh keberhasilan budaya organisasi yang dimiliki. Keberhasilan mengelola organisasi tidak lagi hanya ditentukan oleh keberhasilan prinsip-prinsip manajemen saja, akan tetapi ada faktor lain yang menentukan keberhasilan dalam pencapaian tujuan.

Faktor tersebut adalah budaya organisasi, yakni yang dapat membantu penerapan pemeliharaan kondisi yang kondusif.

b. Penyokongan Pendapatan Keluarga

Peran kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan atau yang dikenal sebagai koperasi wanita di Desa Randubango sangat berpengaruh pada pendapatan keluarga. Koperasi Wanita “Randubango Maju” memberikan kredit untuk tambahan modal kepada para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Berdasarkan unsur kepercayaan koperasi wanita “Randubango Maju” Desa Randubango memberikan pinjaman dana yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran anggotanya yakni untuk mengembangkan usaha atau membuka usaha baru demi terwujudnya keluarga yang sejahtera. Program kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan atau koperasi wanita ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin dalam rangka memperoleh pendapatan yang tetap, melalui upaya peningkatan kapasitas

usaha sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh dan bersaing. Adapun yang belum memiliki usaha dapat memanfaatkan lahan yang tersedia dirumah untuk dimanfaatkan sebagai peluang usaha yakni disektor pertanian. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Nurmiasih selaku Bendahara Koperasi Wanita “Randubango Maju”. Adapun pernyataannya adalah sebagai berikut.

“dengan adanya pinjaman modal dari koperasi wanita jika belum adanya usaha tidak menutup kemungkinan akan tidak bisanya membuat usaha. Dengan memanfaatkan pekarang secara optimal bisa membuat usaha dibidang tani , yaitu pekarangan bisa untuk ditanami dan digunakan untuk beternak dan bisa juga untuk dibangun kolam ikan. Dengan upaya meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Randubango ya lewat bantuan modal yang diberikan oleh koperasi wanita ini. Jika pemanfaatan lahan berhasil kan kebutuhan sayur mayur sudah tersedia dilahan sendiri, jadi pengeluaran ibu-ibu sedikit berkurang dan malah bisa jadi bertambah jika sayur mayur dijual diwarga sekitar atau dipasar. Apabila dijual harganya akan lebih bagus karena sayuran dipekarang tidak mengandung pestisida. Hasil dari itu kan bisa untuk menambah pendapatan keluarga”. (Wawancara Ibu Nurmiasih, Bendahara Koperasi “Randubango Maju” Desa Randubango, 11 September 2016 pukul 10.00 WIB di rumahnya)



Gambar 6. Hasil pemanfaatan pekarangan

Sumber : Data primer hasil penelitian tahun 2016



Gambar 7. Hasil pemanfaatan pekarangan

Sumber : Data primer hasil penelitian tahun 2016

Jadi dengan menghemat pekarang yang ada bisa untuk menghemat pengeluaran dan menambah pendapatan. Karena ibu-ibu untuk memasak dan memenuhi kebutuhan sehari-hari bisa langsung mengambil dari pekarangan dan apabila untuk kebutuhan sehari-hari tercukupi dan hasil tamanan dipekarangan banyak bisa untuk dijual. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Khotijah selaku anggota koperasi yang memanfaatkan lahan pekarangan yang kosong untuk ditanami sayuran dengan teknik hydroponik. Adapun pernyataannya adalah sebagai berikut.

“kalau dikatakan meningkatkan pendapatan ya meningkat mbak, lah ini kan dengan adanya pinjaman modal dari koperasi dan pelatihan dari desa otomatis kan mengurangi biaya pengeluaran soalnya bisa nanam sayur, sayurnya bisa dimasak sendiri bisa juga dijual. Yang biasanya jatah untuk dapur bisa disisihkan untuk biaya anak sekolah atau untuk kebutuhan yang lain. Karena menghemat untuk memasak ngambil bahan makanan bisa dari hasil pekarangan sendiri tidak perlu belanja sayuran sudah cukup bahkan lebih. Tetapi kalau untuk dijual ke pasar masih belum mbak, soalnya panennya belum tentu ya

biasanya dijual ketetangga juga, ya ada yang jual tapi sudah dalam bentuk olahan seperti saya ini menjual gado-gado bahan yang digunakan dari pekarangan jadi belum kalau sampai dijual kepasar". (Wawancara Ibu Kotijah, anggota koperasi wanita "Randubango Maju" Desa Randubango, 12 September 2016 pukul 09.00 wib di rumahnya)

Dengan adanya pinjaman modal dari koperasi, ibu rumah tangga bisa mengembangkan keahliannya sehingga tidak hanya berdiam diri dirumah, pinjaman modal dari koperasi sangat banyak manfaatnya karena sangat membantu perekonomian keluarga masyarakat Desa Randubango. Hal serupa juga dinyatakan oleh Ibu Muslikah sebagai anggota Koperasi Wanita "Randubango maju" Desa Randubango. Adapun pernyataannya adalah sebagai berikut

"saya sangat senang ya mbak dengan adanya pinjaman modal dari koperasi, karena saya bisa membuka usaha kecil-kecilan jual sosis dan jajanan. Dengan jualan ini saya bisa punya penghasilan jadi bisa nambahi uang belanja dan bisa nabung juga mbak. Gaji suami saya biasanya nggak cukup mbak buat sehari-hari, kan suami saya kerjanya serabutan, tapi sekarang alhamdulillah sudah bisa nabung sedikit-sedikit". (Wawancara Ibu Muslikah, anggota koperasi wanita "Randubango Maju" Desa Randubango, 12 September 2016 pukul 10.00 wib di rumahnya)

Jatah uang yang biasa untuk belanja bisa disisihkan untuk keperluan yang lain dan apabila hasil dari pekarangan banyak selain cukup untuk dikonsumsi juga bisa dimanfaatkan sebagai ladang usaha. Selain dalam sektor pertanian, pinjaman modal dari koperasi juga dimanfaatkan untuk membuka usaha kecil sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga setiap masyarakat Desa Randubango. Dengan adanya koperasi yang maju maka berkembang pula kemakmuran masyarakat desa randubango.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Perempuan Dalam Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP)

a. Faktor Pendukung

1. Adanya Pengawasan dari pengelola dibidang pengawas

Pengawasan dari pengelola dibidang pengawas adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan penentuan atau evaluasi mengenai apa yang telah dicapai, sampai berapa jauh pelaksanaan sesuai dengan rencana dan kebijakan. Keberadaan pengawasan ini mampu menolong dan mengorganisasikan dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi, usaha, pendapatan dan kesejahteraan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Keberadaan pengawasan ini sangat mendorong pemberdayaan kelompok wanita dalam kegiatan simpan pinjam di Desa Randubango. Dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi dan memperbaiki Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mengoptimalkan keahlian sampai dengan memanfaatkan pekarang, maka dari itu perlu diadakannya sosialisasi dan penyuluhan.

Dalam memotivasi masyarakat agar mau berkembang dan maju dalam segala hal perlu melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara terus menerus dengan mengadakan pertemuan rutin setiap bulannya. Hal ini agar dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah pola pikir masyarakat, yang tadinya berfikir kaum ibu hanya mengasuh anak saja menjadi kreatif dalam memanfaatkan lahan, menyalurkan

kegiatan kreatifitas dan membuka peluang usaha baru. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Nur Kolipah selaku Pengawas Koperasi Wanita “Randubango Maju” Desa Randubango. Adapun pernyataannya adalah sebagai berikut:

“pertemuan rutin yang diadakan sebulan sekali biasanya diadakan tanggal 10, ini sangat bermanfaat bagi anggota kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan atau koperasi wanita karena menambah pengetahuan dari yang tidak ngerti jadi ngerti. Dalam setiap perkumpulan biasanya anggota kelompok wanita menanyakan dan meminta solusi atas masalah yang dihadapi misalnya seperti masalah perhitungan cicilan, jangka waktu kredit, dan potongan biaya administrasi. Selain diberikan penyuluhan biasanya juga diajarkan praktek bagaimana memanfaatkan peluang bisnis, misalnya praktek bikin kue, masak-masak memanfaatkan olahan hasil pekarangan. Pertemuan rutin setiap bulan ini sangat bermanfaat selain untuk menambah pengetahuan juga memupuk rasa persaudaraan silaturahmi antar tetangga”. (Wawancara Ibu Nur Kolipah, Pengawas Koperasi Wanita “Randubango Maju” Desa Randubango, 14 September 2016 pukul 10.00 wib dirumahnya)

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan maka dapat dikatakan bahwa adanya pengawasan dapat menjadi faktor pendukung pemberdayaan perempuan dalam kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) di Desa Randubango Kecamatan Mojosari.

Karena untuk memberikan pemahaman anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu juga diadakan pertemuan rutin setiap bulannya untuk membahas dan konsultasi masalah yang dihadapi.



Gambar 8. Pengawasan dan pemberian motivasi pada anggota kopwan “Randubango Maju”

Sumber : Dokumentasi Koperasi Wanita “Randubango Maju” Desa Randubango Tahun 2016

Berdasarkan gambar 7 diatas tampak bahwa sedang diadakan pengawasan dan pemberian materi tentang peluang usaha kepada masyarakat khususnya kaum wanita Desa Randubango tentang menjaga kelancaran kredit, proses penyaluran pinjaman modal, mengelola usaha agar berkembang dan pemanfaatan tanaman untuk diolah menjadi sesuatu yang berguna dan mempunyai nilai jual. Pengawasan dilaksanakan oleh pengelola koperasi bidang pengawas dan didampingi petugas dari pihak dinas koperasi yang menangani terkait masalah kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP).



Gambar 9. Pengawasan dan pemberian materi pada anggota kopwan “Randubango Maju”

Sumber : Dokumentasi Koperasi Wanita “Randubango Maju” Desa Randubango Tahun 2016

Berdasarkan gambar 2 diatas adalah kegiatan pengawasan yang diberikan oleh pengelola koperasi terhadap anggota koperasi wanita “Randubango Maju” terkait kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan dan tata cara menjalankan usaha agar tetap stabil.

2. Jumlah dan Aktivitas Anggota

Perkembangan kegiatan simpan pinjam tidak terlepas dari kondisi perkreditan. Dalam proses pembangunan untuk memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakat di pedesaan, pemerintah menciptakan kredit mini, yakni kredit untuk koperasi. Membangun sistem keuangan koperasi bertujuan untuk menyempurnakan sistem keuangan yang sudah ada dan telah dilaksanakan koperasi. Sistem keuangan koperasi merupakan salah satu subsistem dalam pembangunan koperasi secara umum. Dalam hal ini koperasi wanita “Randubango Maju” dalam skala kredit yang sehat dan tidak menimbulkan kredit macet sesuai dengan informasi yang diperoleh

dari pihak koperasi wanita di Desa Randubango. Koperasi wanita “Randubango Maju” Desa Randubango dalam melakukan pengelolaan kredit bisa dibilang sudah cukup baik, sehingga transaksi kredit dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Heni Widiasnunik selaku Sekertaris Koperasi Wanita “Randubango Maju” Desa Randubango. Adapun pernyataannya adalah sebagai berikut:

“alhamdulillah mengenai kelancaran transaksi, sampai sejauh ini transaksi kredit kami masih baik dan lancar. Walau ya ada satu atau dua anggota yang agak molor bayar angsurannya, tapi masih bisa diatasi. Kemudahan selalu kami berikan pada anggota”. (Wawancara Ibu Heni Widiasnunik, Sekertaris Koperasi Wanita “Randubango Maju” Desa Randubango, 16 September 2016 pukul 10.00 wib dirumahnya)

Koperasi yang berhasil menjalankan usaha berkaitan dengan keuangan dan modal, adalah koperasi kredit. Pembangunan koperasi wanita “Randubango Maju” berkembang pesat dari mulai awal berdiri. Hal ini dapat dilihat dari jumlah anggota yang setiap bulannya bertambah. Dan dengan bertambahnya anggota maka modal juga bertambah. Bila dilihat sampai saat ini jumlah anggota koperasi wanita “Randubango Maju” tahun 2016 sudah mencapai 133 orang (bisa dilihat di tabel 6). Ini membuktikan bahwa kaum perempuan di Desa Randubango sudah banyak yang mempunyai keinginan untuk maju. Terhitung sampai saat ini, yakni tahun 2016 modal yang terkumpul mencapai Rp. 206.000.000,- yang awalnya hanya bermodal Rp. 50.000.000,- sejak berdiri pada tahun 2006. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Heni Widiasnunik selaku Sekertaris Koperasi Wanita

“Randubango Maju” Desa Randubango. Adapun pernyataannya adalah sebagai berikut.

“alhamdulillah semakin tahun modal semakin bertambah mbak, anggota juga semakin bertambah, ini tandanya koperasi kita (koperasi wanita “Randubango Maju”) semakin berkembang mbak. Sisa hasil usaha (SHU) yang diberikan pas Rapat Akhir Tahun (RAT) juga semakin bertambah walaupun sedikit. Dengan adanya SHU para anggota juga semakin giat untuk menanam modal ataupun memperlancar kredit” (Wawancara Ibu Heni Widiasunik, Sekertaris Koperasi Wanita “Randubango Maju” Desa Randubango, 16 September 2016 pukul 10.00 wib dirumahnya)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa proses penyaluran kredit yang dilakukan keoperasi sudah bagus dalam melayani masyarakat. Tidak heran apabila banyak anggota yang mulai menaruh kepercayaannya kepada Koperasi Wanita “Randubango Maju”. Bentuk kepercayaan ini menjadi langkah awal yang baik dalam upaya memberikan dukungan untuk kemajuan koperasi dalam masa yang akan datang. Demi kelangsungan dan kelancaran kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan, maka tidak terlepas dengan Rapat Akhir Tahun (RAT) yang biasa dilaksanakan satu tahun sekali. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Nurmiasih selaku Bendahara Koperasi Wanita “Randubango Maju” Desa Randubango. Adapun pernyataannya adalah sebagai berikut.

“Koperasi wanita “Randubango Maju” disini kalau mengadakan RAT satu tahun sekali biasanya dibulan february, dalam RAT kita musyawarah dengan semua anggota untuk pengambilan keputusan, mengumumkan perkembangan modal per tahun dan pembagian SHU (sisa hasil usaha)”. (Wawancara Ibu Nurmiasih, Bendahara Koperasi “Randubango Maju” Desa Randubango, 11 September 2016 pukul 10.00 WIB di rumahnya)



Gambar 10. Rapat Akhir Tahun (RAT) Kopwan “Randubango Maju”
Sumber : Dokumentasi Koperasi Wanita “Randubango Maju” Desa
Randubango Tahun 2016

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bagi anggota koperasi sendiri RAT menjadi kesempatan penting untuk menilai dan menguji tata kelola koperasi yang dijalankan. Anggota koperasi dapat menilai performa kerja pengurus melalui laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas yang wajib dibagikan kepada anggota. Menerima laporan menjadi salah satu hak bagi anggota koperasi. Maka bisa diketahui bahwa Koperasi Wanita “Randubango Maju” Desa Randubango sudah dapat menjalankan organisasi dengan baik dan transparan.

b. Faktor Penghambat

Masih Rendahnya Kemampuan Anggota

Kelancaran dalam penyaluran pinjaman modal atau kredit kepada anggota bukan tidak memiliki kendala dan hambatan. Sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam kehidupan, begitu juga dengan wanita yang juga butuh pengetahuan secara luas diluar tentang rumah

tangga dan mengurus anak. Dalam kegiatan simpan pinjam, sumber daya manusia sangat diperlukan untuk menjalankan semua kegiatan yang meliputi kegiatan tersebut. Oleh sebab itu, pengetahuan sumber daya manusia itu sendiri juga bisa mempengaruhi kegiatan simpan pinjam dalam kelompok perempuan. Di Desa Randubango ini sendiri, kemampuan anggota koperasi wanita dirasa kurang dalam hal pengetahuan tentang koperasi dan manfaat-manfaat tentang koperasi.

Hal ini menjadi salah satu penghambat berjalannya kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan, karena apabila sumber daya manusia tidak atau belum tahu tentang bagaimana cara peminjaman modal atau memanfaatkan pinjaman modal untuk membuat usaha yang menghasilkan dengan benar dan baik, maka hasil yang diharapkan juga kurang maksimal. Selain itu pengetahuan dan wawasan ibu-ibu dikalangan Desa Randubango cenderung masih kurang berkembang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Susmiati yang selaku Pengawas Koperasi “Randubango Maju” Desa Randubango. Adapun pernyataannya adalah sebagai berikut:

“kendala yang lain itu kemampuan ibu-ibu yang masih rendah, padahal kuncinya itu. Rata-rata itu Cuma lulusan SMP, itu pun ada yang gak sampai lulus. Tetap dengan tradisi desa biasanya kalau perempuan hanya ngurus dapur, dan kalau orangtuanya petani ya anak-anaknya juga jadi petani. Secara tidak langsung kan pekerjaan ibu-ibu tidak hanya mengurus rumah tangga tetapi juga membantu suami untuk bekerja. Pengetahuan dan wawasan masyarakat Desa Randubango masih sedikit sekali, SDM nya masih rendah maka pengertian masyarakat tentang koperasi wanita secara menyeluruh masih kurang”. (Wawancara Ibu Susmiati, Pengawas Koperasi “Randubango Maju” Desa Randubango, 5 September 2016 pukul 16.00 WIB di rumahnya).

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa masih rendahnya tingkat kemampuan anggota koperasi simpan pinjam perempuan, hal ini ditunjukkan dari tingkat pendidikan yang rendah sehingga mempengaruhi perilaku sosial masyarakat utamanya kemampuan menyerap informasi dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk meyakinkan mereka. Kemampuan mayoritas kaum wanita di Desa Randubango dalam menyerap informasi merupakan faktor penting dalam mewujudkan kegiatan tersebut, karena itu harus dilakukan komunikasi berulang-ulang agar masyarakat bisa menerimanya.

Dalam satu kawasan Desa Randubango tidak semua kaum perempuan mengikuti atau bergabung dalam kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan. Kegiatan ini sangat penting karena bisa membantu masyarakat Desa Randubango menambah pengetahuan dan memperbaiki ekonomi keluarga. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Musni yang merupakan bukan anggota Koperasi Wanita “Randubango Maju” Desa Randubango. Adapun pernyataannya adalah sebagai berikut:

“saya sebenarnya tahu tentang kegiatan simpan pinjam ini dan ingin ikut masuk jadi anggota juga mbak, tapi saya masih belum paham syarat kalau ingin daftar, saya juga belum ada pikiran modalnya nanti mau dibuat usaha apa. Saya juga masih takut nanti kalau nggak bisa nyicil pinjaman modalnya”. (Wawancara Ibu Musni, bukan anggota Koperasi Wanita “Randubango Maju” Desa Randubango, 17 September 2016 pukul 10.00 wib, dirumahnya)

Alasan masyarakat khususnya kaum perempuan tidak bergabung dalam kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan karena mereka belum paham akan syarat dan prosedur untuk bergabung dalam koperasi wanita. Selain itu, para kaum perempuan juga masih takut

apabila tidak bisa mencicil kredit pinjaman di koperasi wanita dan masih takut untuk membuat usaha. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Kasmuani yang merupakan bukan anggota Koperasi Wanita “Randubango Maju” Desa Randubango. Adapun pernyataannya adalah sebagai berikut:

“saya gak ikut gabung sebagai anggota karena saya belum yakin dengan hasilnya nanti mbak, daripada capek-capek merintis usaha tapi nanti nggak ada hasilnya. Selain itu juga kurang telaten kalau misalnya modalnya buat nanam sayuran atau ternak. Ya mungkin nanti kalau kegiatan simpan pinjam ini hasilnya memang baik dan liat tetangga-tetangga sudah dapat hasil, saya juga akan gabung” (wawancara Ibu Kasmuani, bukan anggota koperasi wanita “Randubango Maju” Desa Randubango, 17 September 2016 pukul 10.45 wib, dirumahnya)

Berdasarkan penelitian dilapangan melalui wawancara maka dapat dikatakan bahwa masyarakat tidak bergabung dalam anggota kegiatan simpan pinjam untuk perempuan atau koperasi wanita, karena belum yakin dengan hasil yang akan diperoleh. Mereka berfikir jika pinjaman modal yang nantinya untuk membuka peluang usaha akan tidak bisa mencapai hasil yang mereka inginkan. Hal ini karena masih rendahnya cara berfikir masyarakat yang hanya ingin hasil dengan instan tanpa melalui proses, dan juga karena kemampuan dan kreatifitas mereka. Sebagian masyarakat Desa Randubango akan bergabung dan melaksanakan kegiatan tersebut apabila anggota memang telah memperoleh manfaat yang baik dari hasil kegiatan tersebut.

C. Analisis dan Interpretasi Data

1. Pemberdayaan Perempuan Dalam Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP)

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan, sebagai proses, pemberdayaan merupakan kegiatan serangkaian untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami kemiskinan. Pemberdayaan sebagai proses merupakan perubahan diri masyarakat secara aspiratif menuju kesejahteraan dan kemandirian (Nadhir, 2009:1). Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada hasil atau keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki rasa kepercayaan diri, mempunyai mata pencaharian, mampu menyampaikan aspirasi, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas kehidupannya.

Proses pemberdayaan perempuan di Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto adalah melalui kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP). Kegiatan ini didukung oleh Pemerintah Desa hingga Dinas Koperasi. Pemerintah Desa dan Dinas Koperasi biasanya bertugas untuk mengadakan penyuluhan. Penyuluhan dalam hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para pelaku utama (Masyarakat khususnya kelompok simpan pinjam atau koperasi wanita). Praktik lapangan yang dipandu oleh penyuluh ini bertujuan untuk menguji seberapa efektif program pemberdayaan dari

pemerintah kepada pelaku utama dapat dipahami dan diterapkan secara nyata khususnya di Desa Randubango.

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Pemungkinan : Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal melalui upaya bantuan modal usaha

Proses pengembangan potensi masyarakat sangat diperlukan untuk mengetahui suatu organisasi bisa terus tumbuh sejalan dengan kemampuan masyarakat anggota koperasi. Dalam hal ini demi menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal pengelola koperasi wanita sering mengadakan diskusi dan pelatihan demi terwujudnya perkembangan potensi masyarakat. Menurut Mariot Tua Efendy H (dalam Asri Laksmi, 2013; 88) pelatihan dan pengembangan dapat didefinisikan sebagai usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan. Pelatihan dan pengembangan merupakan dua konsep yang sama, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan. Tetapi, dilihat dari tujuannya, umumnya kedua konsep tersebut dibedakan. Pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini, dan pengembangan lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan pada saat yang akan datang.

Pelatihan bagi karyawan merupakan sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik,

sesuai dengan standar. Sedangkan pengembangan memiliki ruang lingkup lebih luas, dapat berupa upaya meningkatkan pengetahuan yang mungkin digunakan segera atau sering untuk kepentingan dimasa depan.

Pengembangan sering dikategorikan secara eksplisit dalam pengembangan manajemen, organisasi, dan pengembangan individu. Penekanan lebih pokok adalah pada pengembangan manajemen. Dengan kata lain, fokusnya tidak pada pekerjaan kini dan mendatang, tetapi pada pemenuhan kebutuhan organisasi jangka panjang. Sjafrri Mangkuprawira (dalam Asri Laksmi, 2013:88)

2. Penguatan : Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan kebutuhannya melalui upaya kegiatan pendidikan dan pelatihan anggota kopwan

Pengembangan sumber Daya Manusia atau *Human Resources Development* secara singkat didiskripsikan sebagai peningkatan kualitas manusia dalam makna fisik maupun mental. Indikator yang ditunjuk pertama adalah gizi, usia harapan hidup, dan pendidikan. Ada pula yang menunjuk produktivitas, pendapatan dan kebebasan manusia sebagai indikator kualitas manusia. Secara sistematis indikator kualitas manusia yang perlu diupayakan-kembangkan dapat dikelompokkan menjadi dua indikator, yaitu: kualitas dalam makna instrumental seperti: kreativitas, kebebasan, dan gizi ; dan dalam makna substansial, seperti: tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, kesejahteraan, dan usia harapan. Alternatif indikator kualitas manusia yang dapat didasarkan pada indikator instrumental atau didasarkan pada indikator

substansial, dnegan aspek-aspek: sosial, politik, ekonomi, budaya, agama, ilmu, dan fisik. Ketujuh aspek tersebut bila dikaitkan dengan indikator tingkat keberhasilan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) dalam makna instrumental dapat dilihat pada seberapa kreativitas dalam aspek kebebasan, tanggungjawab, dan kemampuan produktif. Sedangkan indikator tingkat keberhasilan dalam makna substansial yaitu: pendapatan atau penghasilan, pendidikan, kesehatan, dan ketangguhan mental. (Noeng Muhadjir, 1992: 121-122)

Dalam hal ini kegiatan pemberdayaan berarti pendayagunaan sumber daya, baik alam maupun sumber daya manusia sehingga harkat dan kesejahteraan meningkat. Menurut Noeng Muhadjir (1992:142) Tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan harkat kemanusiaan manusia. Pengembangan itu sendiri ditelaah dari tiga tindakan, yaitu: kebijakan yang dipakai unuk pengembangan sumberdaya tersebut, perencanaan pengembangannya, dan pengelolaan sumberdaya itu sendiri. Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan ini untuk mewujudkan kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan melalui pemberdayaan masyarakat. Dimana dalam kegiatan ini kaum perempuan didorong untuk dapat berkembang dari segi kemampuan, kreatifitas hingga pengetahuan.

Pengembangan sumber daya manusia dirasa semakin penting manfaatnya karena tuntutan kemajuan di era sekarang yang semakin ketatnya persaingan. Karena hal itu, wanita juga berhak untuk diberdayakan dan dapat berusaha dibidang usaha apapun, selain itu perempuan juga lebih kreatif dibandingkan dengan laki-laki. Peran perempuan dirasa sangat penting bagi

keluarga maupun masyarakat luas. Perempuan mempunyai peran ganda yaitu sebagai pembina rumah tangga(sektor domestik) dan pencari nafkah (sektor publik). Pemberdayaan kelompok perempuan dalam kegiatan simpan pinjam merupakan pemberdayaan masyarakat yang anggotanya adalah para kaum perempuan atau para istri, mereka didorong untuk dapat mengembangkan kegiatan koperasi agar dapat membantu dan mengembangkan usaha-usaha mereka dengan harapan dapat meningkatkan ketersediaan kebutuhan hidup keluarga. Hal ini selaras dengan pendapat Sulistiyani (2004:80) yang menyatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri.

3. Perlindungan : Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, dan menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan lemah melalui upaya pembekalan ide kreatif agar usaha setiap anggota beragam

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai cita-cita kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Didalamnya tercantum dasar demokrasi ekonomi kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran segolongan orang atau perorangan. Selain itu amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 mensyaratkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan yang menekankan pada usaha mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa harus merupakan usaha bersama dari bangsa dan seluruh rakyat yang dilakukan dengan cara gotong royong dan dijiwai semangat kekeluargaan. Salah satu bentuk usaha tersebut adalah sector usaha kecil yang

mebenarnya memiliki posisi strategis dalam upaya menunjang pencapaian tugas pembangunan secara umum dan secara khusus memperbaiki dan memperkuat perekonomian, sehingga terhadap usaha kecil ini perlu dilakukan pemberdayaan dan pembinaan yang baik agar dapat bersaing. Hal ini ditegaskan dalam GBHN tahun 1999-2004 yang menyatakan pentingnya upaya pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan mengembangkan system ekonomi kerakyatan yang bertumpuh pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan(GBHN 1999 butir 7). (Untung Tri Basuki, 2004:1-2)

Didalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 disebutkan bahwa arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal dilakukan dalam hal terkait dengan pengaturan persaingan usaha, hal ini dikarenakan persaingan usaha merupakan faktor penting dari iklim penanaman modal untuk mendorong kemampuan ekonomi, maka :

- 1) Perlu menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama dimasing-masing level pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari permusuhan dan pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
- 2) Perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan, seperti penetapan syarat

perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga barang yang mematikan pesaing.

- 3) Lembaga pengawas persaingan usaha yang telah dibentuk pemerintah perlu terus mengikuti perkembangan terakhir praktik-praktik persaingan usaha, termasuk kompleksitas praktik dan aturan persaingan usaha Negara lain.

Berkaitan dengan hal tersebut, peminjaman modal dan penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu system perekonomian (Ahyar Ari Gayo, 2015:159-160).

4. Pemeliharaan : memelihara kondisi yang kondusif agar tetap menjadi keseimbangan distribusi antara berbagai kelompok dalam masyarakat melalui upaya mewujudkan aspirasi anggota kopwan

Dalam rangka melaksanakan upaya pemberdayaan terhadap usaha kecil, maka selain diperlukan adanya upaya penciptaan iklim usaha yang kondusif, diperlukan pula adanya pemberian bantuan perkuatan kepada usaha kecil. Bantuan perkuatan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Undang-undang nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil dalam Pasal 14 menyatakan bahwa

Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi. Jadi, paling sedikit ada 4 bidang yang harus dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam rangka pemberian bantuan perkuatan kepada usaha kecil di Indonesia yang diminta oleh Undang-undang tentang usaha kecil. **Pertama**, Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan dengan cara:

- a. Meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan;
- b. Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan;
- c. Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan.

Kedua, Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang pemasaran, baik di dalam maupun diluar negeri, dengan cara :

- a. Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- c. Menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji coba pasar;
- d. Mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi;
- e. Memasarkan produk usaha kecil.

Ketiga, Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang sumber daya manusia dengan cara :

- a. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;

- b. Meningkatkan ketrampilan teknis dan manajerial;
- c. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan, dan konsultasi usaha kecil;
- d. Menyediakan tenaga penyuluh dan konsultan usaha kecil.

Keempat, Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang teknologi dengan cara :

- a. Meningkatkan kemampuan dibidang teknologi produksi dan pengendalian mutu;
- b. Meningkatkan kemampuan dibidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- c. Memberi insentif kepada usaha kecil yang menerapkan teknologi baru dan melestarikan lingkungan hidup;
- d. Meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- e. Meningkatkan kemampuan memenuhi standarisasi teknologi;
- f. Menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penelitian dan pengembangan di bidang desain dan teknologi bagi usaha kecil. (Untung Tri Basuki, 2004:73-75)

b. Penyokongan Pendapatan Keluarga

Begitu kompleksnya peran perempuan dalam rumah tangga (keluarga) serta beratnya beban yang ditanggung oleh perempuan dalam keluarga miskin, maka diperlukan pemikiran tentang konsep pemberdayaan perempuan yang mempertimbangkan berbagai aspek yang meliputi peran perempuan tersebut. Wanita penting untuk ditingkatkan pemberdayaannya dan mengartikan pemberdayaan bukan dalam konteks mendominasi orang

lain dengan makna apa yang diperoleh wanita merupakan kehilangan bagi laki-laki melainkan menempatkan pemberdayaan dalam arti kemampuan wanita untuk meningkatkan kemandirian (*self reliance*) dan kekuatan dalam dirinya (*internal strength*). (Priyono, 1996: 199)

Keterlibatan perempuan dalam kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan adalah karena dorongan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga atau di sisi lain mungkin membuat posisi perempuan semakin kuat dalam keluarga. Semakin tinggi pendapatan perempuan dalam menyumbangkan pendapatan dalam pendapatan keluarga, maka semakin baik pula karena juga untuk membantu perekonomian keluarga. Peran perempuan dalam membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarganya. Dari segi ekonominya kelompok perempuan yang tergabung dalam anggota koperasi wanita dapat membantu dalam meningkatkan perekonomian atau pendapatan keluarga. Dengan memberdayakan kelompok wanita dengan cara memberikan pinjaman modal untuk membuka ladang penghasilan tambahan, maka masyarakat Desa Randubango bisa meningkatkan pendapatannya apabila usaha yang dijalankan bisa berjalan.

Penjelasan tentang peningkatan pendapatan di Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto diatas telah sesuai dengan konsep atau teori peningkatan pendapatan, dimana masyarakat bisa lebih menghemat biaya belanja untuk disisihkan agar dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Dan dengan memberdayakan wanita selain bekerja sebagai ibu rumah tangga, mereka juga berperan dan ikut berpartisipasi dalam

mencari nafkah untuk pemenuhan ekonomi keluarganya. Dalam semua kegiatan pasti memiliki tujuan yang besar tidak terkecuali pemberdayaan.

Pemberdayaan bisa merupakan suatu proses awal dalam perencanaan untuk mencapai tujuan yang besar tersebut. Dalam konteks penelitian kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan ini memiliki tujuan besar yaitu meningkatkan pendapatan keluarga agar menjadi keluarga yang sejahtera dengan cara membuka usaha, pemanfaatan pekarangan untuk sektor pertanian dan perikanan.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pemberdayaan Perempuan Dalam Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP)

a. Faktor Pendukung

1. Adanya Pengawasan dari pengelola dibidang pengawas

Di lingkungan Desa Randubango, adanya penyuluhan yang berasal dari pemerintah desa dan dinas koperasi akan mempunyai pengaruh yang sangat penting. Adanya pengawasan dianggap paling efektif untuk mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan. Pengawas dapat memberikan contoh pengelolaan usaha, jika berhasil maka dapat menarik masyarakat yang lain disekitarnya untuk melakukan hal yang sama. Dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan dalam kegiatan simpan pinjam perempuan (SPP). Adanya pengawas dapat menjadi tenaga tambahan pendamping kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan.

Pengawasan adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan penentuan atau evaluasi mengenai apa yang telah dicapai, sampai berapa jauh

pelaksanaan dan kebijaksanaan. Dalam mewujudkan masyarakat yang berkembang dengan bantuan pinjaman modal dari koperasi wanita untuk memanfaatkan lahan dirumah atau membuka usaha lain sebagai ladang penghasilan dengan dukungan pemerintah desa dan pengelola dibidang pengawas. Kegiatan pengawasan merupakan sistem pendidikan non formal yang berupaya memberdayakan kaum perempuan untuk memperbaiki kehidupan dan penghidupannya, sehingga lebih bisa berpartisipasi dalam pemenuhan ekonomi dan kesejahteraan keluarga.

Hal ini sesuai dengan yang dikekmukakan oleh H.S. Hadibroto dan Oemar Witarsa (1985:3) pengawasan secara konkrit yakni pemeriksaan secara detail oleh pengawas apakah ada penyimpangan dalam pelaksanaan. Untuk dapat menentukan adanya penyimpangan perlu diketahui dulu pada tahap perencanaan norma-norma ataupun ukuran yang menjadi dasar hasil pelaksanaan yang diharapkan, selain kebijaksanaan dalam pelaksanaannya.

2. Jumlah dan Aktivitas Anggota

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009 telah menetapkan agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam lima tahun kedepan. Salah satu upaya mewujudkan rencana peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah dengan menciptakan lapangan kerja yang luas, sehingga mengurangi angka pengangguran. Strategi lain adalah peningkatan pendapatan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin menjadi sekitar 8,2% pada tahun 2009 (Bappenas, 2004:22 dalam Abdul Salam, 2008:1). Tantangan yang dihadapi semakin berat, karena jumlah penduduk miskin belum berkurang, bahkan terus bertambah. Salah satu upaya

yang dapat ditempuh untuk mengatasi keadaan tersebut adalah melalui percepatan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro.

Usaha mikro atau sektor informal berperan substansial dalam pembangunan ekonomi karena sebagian besar pelaku usaha di Indonesia tergolong usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Memberdayakan UMKM berarti meningkatkan kualitas perekonomian sebagian besar pelaku usaha. Faktor penting yang mendorong usaha mikro dan kecil mampu mempercepat penyerapan tenaga kerja adalah motivasi dan keinginan wirausaha yang tinggi. Hal ini yang menjadi awal terbentuknya program SPP yakni Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan. Tujuan pembentukan koperasi simpan pinjam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi, yang pada akhir periode kerja pencapaian tujuan tersebut harus dapat ditampilkan dalam laporan promosi ekonomi anggota. (Ahmad Subagyo, 2014:8)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bagi anggota koperasi sendiri RAT menjadi kesempatan penting untuk menilai dan menguji tata kelola koperasi yang dijalankan. Anggota koperasi dapat menilai performa kerja pengurus melalui laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas yang wajib dibagikan kepada anggota. Menerima laporan menjadi salah satu hak bagi anggota koperasi. Maka bisa diketahui bahwa Koperasi Wanita “Randubango Maju” Desa Randubango sudah dapat menjalankan organisasi dengan baik dan transparan. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ahmad Subagyo (2014:215) bahwa tujuan utama rapat anggota adalah membahas pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan kegiatan usaha

koperasi selama satu tahun dan mengesahkan program kerja koperasi serta rencana anggaran pendapatan belanja koperasi kedepan, serta memilih pengurus, pengawas yang masa baktinya telah habis.

b. Faktor Penghambat

1. Rendahnya Kemampuan Anggota

Kemampuan masyarakat merupakan faktor penggerak dalam pembangunan. Pendidikan merupakan faktor penting yang mempengaruhi kemampuan dalam menyerap informasi. Melalui pendidikan masyarakat dapat banyak ilmu yang sangat berguna dalam pengembangan kehidupan mereka. Dengan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) sebagai mewujudkan program ini maka masyarakat akan dibina dan terjadi transfer ilmu pengetahuan yang dapat meningkatkan kemampuan anggota. Untuk itu penyuluhan harus tetap dijalankan sampai masyarakat merasa mandiri dan dapat memecahkan masalah yang ada.

Upaya pemberdayaan masyarakat umumnya dilakukan secara kolektif. Hal ini sejalan dengan pendapat Parsons *et.al* (Dalam Suharto, 2005:66) bahwa tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu-lawan-satu antara pekerja sosial dan klien dalam *setting* pertolongan perseorangan. Program-program pemberdayaan selalu dijalankan oleh kelompok, karena tidak mungkin individu mengelolanya sendiri. Untuk itu masyarakat harus berkelompok untuk ikut serta dalam program pemberdayaan. Sumber daya manusia

merupakan aspek kehidupan yang sangat penting, begitu pula dalam koperasi wanita. Dalam koperasi wanita, sumber daya manusia berperan sebagai penggerak suatu pelaksanaan suatu usaha. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan usaha diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam menjalankan usaha agar berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik pula.

Sejalan dengan hal tersebut, Djahidin (2007:25-26) mengatakan bahwa sumberdaya manusia dapat mendukung keunggulan kompetitif secara terus menerus melalui pengembangan kompetensi dalam suatu organisasi maupun suatu kegiatan. Artinya bahwa dengan sumber daya manusia yang berkualitas, tujuan dari organisasi akan dengan mudah tercapai, begitu juga dengan konteks peningkatan pendapatan, dengan berbagai program serta strategi yang dibuat secara konseptual tentunya akan lebih mudah diterima oleh kelompok perempuan yang memiliki kualitas sumber daya yang mumpuni. Namun fakta dilapangan kualitas sumber daya manusia di Desa Randubango Kecamatan Mojosari sendiri dinilai masih rendah. Masih banyaknya sumber daya manusia khususnya kaum ibu-ibu disini mempunyai pengetahuan yang sangat minim tentang koperasi wanita. Apabila masyarakat khususnya kaum wanita ini kurang mengetahui tentang cara bercocok tanam yang lebih baik, maka produksi yang akan dihasilkan juga akan kurang baik pula. Ini menjadi hambatan dalam mewujudkan anggota yang berpengalaman dan terampil serta berpengaruh pula dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Masyarakat yang kurang tahu aspek-aspek yang terkandung untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan, maka terwujudnya pemberdayaan



perempuan dalam kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan pun akan sulit.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian hasil dan pembahasan terhadap fokus yang diteliti seperti yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pemberdayaan perempuan dalam kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) telah dilakukan dengan baik dan diterima oleh masyarakat Desa Randubango Kecamatan Randubango Kabupaten Mojokerto. Walaupun pada pemberdayaan perempuan dalam kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) masih ada beberapa faktor penghambat pelaksanaan kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP). Akan tetapi upaya pemberdayaan perempuan dalam kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) ternyata mampu membantu masyarakat Desa Randubango dalam meningkatkan perekonomian dengan membuka usaha dan memanfaatkan lahan pekarangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sehubungan dengan pemberdayaan perempuan dalam kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) maka dapat disimpulkan:

1. Pemberdayaan perempuan dalam kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) di Desa Randubango
 - a. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal, hal ini ditunjukkan dengan cara adanya peminjaman modal usaha untuk

masyarakat yang bertujuan untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat agar berkembang secara optimal diperlukan usaha-usaha yang menyadarkan dan menanamkan pengertian kepada masyarakat agar dapat menggunakan dengan lebih baik semua kemampuan yang dimiliki.

- b. Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Hal ini dilakukan agar kompetensi dan komitmen bisa meningkat sehingga masyarakat dapat berkreasi dan berinovasi dalam menciptakan usaha.
- c. Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, dan menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan yang lemah. Dalam hal ini pengelola koperasi menghimbau agar masyarakat tidak membuka usaha yang sama, walaupun ada yang membuka toko kebutuhan sehari-hari, harga toko kecil dan toko besar harus sama agar tidak ada persaingan antara masyarakat.
- d. Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap menjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan melalui cara pendekatan komunikasi, tujuannya agar setiap gagasan dalam organisasi dapat dipahami secara efektif oleh seluruh anggota.
- e. Penyokongan pendapatan keluarga. Program kegiatan simpan pinjam untuk perempuan ini bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam bidang usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin dalam rangka memperoleh pendapatan yang tetap, melalui upaya peningkatan kapasitas

usaha sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh dan bersaing.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemb Pemberdayaan perempuan dalam kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) di Desa Randubango

a. Faktor pendukung yang ditemukan dalam penelitian ini adalah :

1) Adanya pengawasan kepada anggota koperasi wanita yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki SDM dengan mengoptimalkan keahlian sampai dengan memanfaatkan pekarangan.

2) Jumlah dan aktivitas anggota koperasi wanita semakin tahunnya semakin bertambah, ini membuktikan bahwa adanya kemauan kaum wanita untuk mandiri dan memperbaiki ekonomi keluarga agar sejahtera.

b. Faktor penghambat yang ditemukan dalam penelitian ini adalah :

1) Masih rendahnya kemampuan anggota koperasi wanita. Al ini ditunjukkan dari tingkat pendidikan yang rendah sehingga mempengaruhi perilaku social masyarakat utamanya dalam kemampuan menyerap informasi dan membutuhkan waktu yang lama untuk meyakinkan dan memberikan pemahaman kepada anggota.

B. Saran

Berdasarkan atas kesimpulan diatas dan dari hasil penelitian, maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai bahan pertimbangan bagi Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dalam Pemberdayaan Perempuan Dalam Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP). Adapun saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Perlunya penambahan pengawasan dari pengelola bidang pengawas karena melihat anggota Koperasi Wanita “Randubango Maju” yang semakin bertambah setiap tahunnya tetapi pengawas hanya sedikit, karena itu sangat berpengaruh nantinya pada saat memberikan sosialisasi dan arahan pengetahuan pasti kurang efektif karena tidak sebanding dengan jumlah anggota.
2. Syarat dan prosedur pengajuan pinjaman modal usaha kepada koperasi wanita “Randubango Maju” sebaiknya lebih disederhanakan agar warga yang pengetahuannya rendah tidak bingung dan takut untuk mengajukan pinjaman modal usaha.
3. Perlunya sosialisasi tentang pentingnya pembayaran angsuran tepat waktu, agar anggota koperasi menjadi lebih disiplin dalam membayar angsuran pinjaman modal supaya koperasi bisa terus berkembang.
4. Dalam kegiatan simpan pinjam, sumber daya manusia sangat diperlukan untuk menjalankan semua kegiatan yang berkaitan dengan koperasi. Sedangkan sumber daya manusia di Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto masih rendah. Oleh sebab itu sebaiknya pengelola memberikan pelatihan dan pemahaman yang lebih sering pada masyarakat, agar masyarakat mendapatkan pengetahuan yang luas sehingga dapat terbentuk sumber daya manusia yang berkualitas.
5. Sebaiknya pelatihan kreasi dari bahan daur ulang misalnya plastik lebih divariasikan lagi supaya warga bisa menghasilkan produk yang bervariasi, dan juga jadwal pelatihan diadakan lebih sering agar masyarakat dapat belajar dengan cepat.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode penelitian administrasi publik teori dan aplikasi*.

Yogyakarta: Gava Media.

Afifudin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep, Teori, dan Implikasinya di Era Reformasi*. Bandung: Alfabeta.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI. 2004.

Analisis Evaluasi Hukum Tentang Persaingan Usaha Kecil Di Era Pasar Bebas.

Jakarta.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI. 2015.

Efektivitas Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Mendorong Iklim

Investasi Yang Kondusif Didaerah. Jakarta.

Cholisin. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. Disampaikan Pada Gladi Manajemen

Pemerintahan Desa Bagi Kepala Bagian/Kepala Urusan Hasil Pengisian Tahun

2011 Kabupaten Sleman.

Effendi, Tadjuddin. 1995. *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja Dan Kemiskinan*. PT.

Tiara Wacana. Yogyakarta.

Fuad, Anis Dan Nugroho, Kandung Spto. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*.

Yogyakarta : Graha Ilmu.

Hadibroto. S dan Oemar Witarsa. 1984. *Sistem Pengawasan Intern (System Of Internal*

Control). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Handayani, Trisakti. 2001. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Pusat Studi Wanita

dan Kemasyarakatan Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.

Hati, Lila, P. 2005. *Kekuasaan dalam Masyarakat*. Edisi No.21/Tahun X/Agustus 2005.

Kartasasmitha, Ginanjar. 1998. *Pemberdayaan Masyarakat Sebuah Tinjauan Administrasi*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Administrasi Pada FIA. Universitas Brawijaya. Malang.

Listyaningsih. 2014. *Administrasi Pembangunan, Pendekatan Konsep Dan Implementasinya*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Mardikarto, Totok dan Soebianto Poerwoko. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : ALFABETA.

Miles, Hubberman dan Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. United States of America: Sage Publications.

Mikkelson, Britha. 2001. *Metodologi Penelitian Partisipasi Dalam Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Muhadjir, Noeng. 1992. *Perencanaan dan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Rake Sarasin.

Nawani, Hadawi. 1983. *Administrasi dan Organisasi Bimbingan dan Penyuluhan*. Jakarta : Galia Indonesia.

Prijono, Onny. S. Pranaka, A.M.W. 1996. *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan Dan Implementasi*. Centre For Strategic And International Studies (CSIS). Jakarta.

Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan. 2004. *Buku Pintar Penyuluhan Kehutanan Edisi Ketiga*. Jakarta: Departemen Kehutanan Sekertaris Jendral Pusat Penyuluhan Kehutanan.

Quah, Euston. 1990. *Surveys in Modern Economics*, McGraw-Hill Book Co-Singapore.

Sadan, Elisheva. 2004. *Empowerment And Community Planning* (e-book). url: www.mpow.org/elisheva_sadan_empowerment_spreads.pdf.

Salam, Abdul. 2008. *Sustainabilitas Lembaga Keuangan Mikrooperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta: Sekola Pascasarjana UGM.

Siagian, Sondang P. 2003. *Administrasi Pembangunan; Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Subagyo, Ahmad. 2014. *Manajemen Koperasi Simpan Pinjam*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Sudriamunawar, Haryono. 2002. *Pengantar Study Administrasi Pembangunan*. Bandung: Mandar Maju.

Sugiono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.

Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.

Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: UM-Press.

Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Syafri, Wirman. 2012. *Study Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.

Wirman, Syafri. 2012. *Study Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.

Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat, Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.